

**LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN *PERMANENT
STRUCTURED COOPERATION* (PESCO) SEBAGAI
STRATEGI PERTAHANAN UNI EROPA**

SKRIPSI



Oleh :

**JEANITA WISMARA ATTATA
151190094**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2025

**LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN *PERMANENT
STRUCTURED COOPERATION* (PESCO) SEBAGAI
STRATEGI PERTAHANAN UNI EROPA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta**



Oleh :

**JEANITA WISMARA ATTATA
151190094**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan / penjiplakan / plagiasi, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

JEANITA WISMARA ATTATA

NIM. 151190094

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pembentukan *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) sebagai strategi pertahanan Uni Eropa. Kerangka mekanisme ini merupakan salah satu upaya signifikan dalam peningkatan kerja sama pertahanan dan otonomi strategis Uni Eropa. menggunakan teori neofungsionalisme Ernst B. Haas, khususnya konsep *political spillover*; penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana tekanan politik dan ancaman eksternal memicu kerja sama institusional yang lebih dalam di sektor pertahanan Uni Eropa. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh berupa artikel, jurnal, buku, skripsi, laporan, media cetak maupun media elektronik. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji pola-pola dan tindakan yang diambil oleh Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Uni Eropa dalam membentuk PESCO sebagai strategi pertahanan didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk kebutuhan untuk memiliki otonomi strategis di bidang pertahanan dan bentuk komitmen negara-negara anggota Uni Eropa dalam bidang pertahanan yang ambisius dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam keputusan atas pembentukan PESCO dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, termasuk tekanan politik yang ditimbulkan dari Amerika Serikat terhadap Uni Eropa dan perubahan dinamika geopolitik di kawasan Eropa. Kesimpulannya, pembentukan PESCO tidak hanya mencerminkan alat kerja sama pertahanan diantara negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi juga menunjukkan bahwa Uni Eropa mampu memajukan otonomi strategisnya dan menegaskan dirinya sebagai aktor keamanan yang kredibel di kancah global. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai keputusan Uni Eropa untuk membentuk mekanisme pertahanan strategis serta implikasinya terhadap hubungan internasional.

Kata kunci: Uni Eropa, PESCO, Pertahanan

ABSTRACT

This study aims to analyze the background of the formation of Permanent Structured Cooperation (PESCO) as a European Union defense strategy. This mechanism framework is one of the significant efforts in enhancing defense cooperation and strategic autonomy in the European Union. Using Ernst B. Haas's neofunctionalism theory, particularly the concept of political spillover, this study will explore how political pressure and external threats trigger deeper institutional cooperation in the European Union defense sector. Haas, particularly the concept of political spillover, this study will explore how political pressure and external threats trigger deeper institutional cooperation in the European Union's defense sector. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach. The data obtained consists of articles, journals, books, theses, reports, print media, and electronic media. Data analysis is conducted by identifying and examining patterns and actions taken by the European Union. The research findings indicate that the European Union's decision to establish PESCO as a defense strategy is driven by several key factors, including the need for strategic autonomy in the defense sector and the ambitious and inclusive commitment of EU member states in the defense sector. Additionally, this study also found that the European Union's approach in deciding to establish PESCO was influenced by internal and external factors, including political pressure from the United States on the European Union and changes in the geopolitical dynamics in the European region. In conclusion, the establishment of PESCO not only reflects a tool for defense cooperation among EU member states but also demonstrates that the EU is capable of advancing its strategic autonomy and asserting itself as a credible security actor on the global stage. The findings of this study are expected to contribute to a deeper understanding of the EU's decision to establish a strategic defense mechanism and its implications for international relations.

Keywords: European Union, PESCO, Defense

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Latar Belakang Pembentukan *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) Sebagai Strategi Pertahanan Uni Eropa”. Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu menunjukkan kekuatan, kasih serta kebesaran-Nya yang senantiasa membersamai, hingga saya dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan studi penulis di UPN “Veteran” Yogyakarta.
2. Kedua orang tua saya, Ayah Suharyana dan Ibu Triana Handayani, yang selalu menjadi sumber kekuatan, cinta, serta doa yang tak henti. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas pengorbanan, kesabaran, dan dukungan yang tak pernah putus, baik secara moral maupun materi. Tanpa kehadiran dan kasih sayang kalian, saya tidak akan mampu berada titik ini.
3. Kepada adik saya, Abyan Masaeas Rasendriya, yang memberikan semangat melalui cara-cara sederhana namun berarti, serta harapan agar adik juga bisa meraih kesuksesan yang sesuai dengan apa yang adik mau dan mampu.
4. Prof. Dr. Muhammad Irhas Effendi, M.S selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan selama saya menempun studi di universitas ini.
5. Bapak Drs. Muharjono, M.Si selaku dosen pembimbing, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama proses penyusunan penelitian ini. Tanpa dukungan dan ilmu yang diberikan, tugas akhir ini tidak akan terselesaikan sebagaimana mestinya.

6. Bapak Aryanta Nugraha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, saya mengucapkan terima kasih atas arahan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai berharga yang sangat bermanfaat bagi saya selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat SMA saya, Elsani Rana Isyahnuni, M. Ricko Danang, dan M. Zidane Fahrezi, saya ucapkan terima kasih selalu kebersamaan dengan dukungan tiada hentinya, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Dan akhirnya kita semua sarjana.
9. Aramitha Fadhila Agitha Putri dan Aghnia Abidina Rudian, terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan untuk dua perempuan lucu dan penuh semangat ini, atas segala kerja sama, candaan, dan saling dukung yang membuat masa kuliah menjadi perjalanan yang tak terlupakan.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

JEANITA WISMARA ATTATA

NIM. 151190094

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah	6
D. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Neofungsionalisme.....	6
2. Konsep Limbangan (<i>Spillover</i>).....	7
E. Argumen Pokok.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
3. Teknik Analisa Data.....	12
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Akademis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
3. Manfaat Studi Lanjutan	12
H. Batasan Penelitian	13
I. Sistematika Penelitian	13
BAB II DINAMIKA KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PERTAHANAN UNI EROPA DAN PEMBENTUKAN MEKANISME KERJA PESCO SERTA PROFILE NEGARA KONTRIBUTOR.....	14
A. Evolusi Kelembagaan Kerja Sama Pertahanan Uni Eropa.....	14

B. Pembentukan dan Mekanisme Kerja PESCO	18
C. Profile dan Kontribusi Negara Anggota Serta Tantangan Implementasi PESCO	24
BAB III ANCAMAN DAN KONFLIK TERHADAP UNI EROPA	29
A. Ancaman dan Kekhawatiran Yang Dihadapi Uni Eropa 2009 - 2017	29
1. Aneksasi Krimea oleh Rusia.....	29
2. Brexit dan Pergeseran Kepemimpinan Perancis-Jerman: Peluang Strategis untuk PESCO.....	33
B. Konflik Yang Dihadapi Uni Eropa	38
1. Kritik Presiden Trump Terhadap Negara-negara NATO.....	38
2. Ancaman Penarikan Pasukan Militer Amerika Serikat di Eropa	41
C. PESCO sebagai Hasil Institusional dari Tekanan Geopolitik.....	43
BAB IV KESIMPULAN.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 17 Proyek PESCO Pada Gelombang Pertama Periode 2018 - 2019	23
Gambar III. 1 Peta Konflik Aneksasi Krimea oleh Rusia tahun 2014.....	30
Gambar III. 2 Peta Persebaran Negara Partisipasi Dalam Kampanye " <i>Leave EU</i> "	34

DAFTAR SINGKATAN

CARD	: <i>Coordinated Annual Review on Defence</i>
CFSP	: <i>Common Foreign and Security Policy</i>
CFREU	: <i>Convention on the Future of Europe</i>
CSDP	: <i>Common Security and Defence Policy</i>
EC	: <i>European Community</i>
ECSC	: <i>European Coal and Steel Community</i>
EDA	: <i>European Defense Agency</i>
EDC	: <i>European Defense Community</i>
EDF	: <i>European Defence Fund</i>
EEAS	: <i>European External Action Service</i>
EEC	: <i>European Economic Community</i>
EMU	: <i>European Monetary Union</i>
ESDP	: <i>European Security and Defense Policy</i>
EUGS	: <i>European Union Global Strategy</i>
EUMS	: <i>European Union Military Service</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
HR/VP	: <i>High Representative of the Union for Foreign and Security Policy/Vice-President of the European Commission</i>
JHA	: <i>Justice and Home Affairs</i>
MPF	: <i>Multiannual Financial Framework</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organizations</i>
NIPs	: <i>National Implementation Plans</i>
PESCO	: <i>Permanent Structured Cooperation</i>
TCE	: <i>Treaty of the Constitution of Europe</i>
TEU	: <i>Treaty of European Union</i>
WEU	: <i>Western European Union</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak awal berdirinya, Uni Eropa menyadari akan pentingnya mekanisme pertahanan yang dapat memastikan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara-negara anggotanya. Selama beberapa dekade, Uni Eropa berupaya untuk mengembangkan strategi pertahanannya dalam menghadapi dinamika kekuatan global dan ancaman keamanan yang semakin meningkat yang muncul dari dalam ataupun luar Eropa. Pembentukan kebijakan pertahanan yang komprehensif menjadi landasan upaya Uni Eropa untuk melindungi warganya dan kewasannya dari situasi global yang semakin tidak stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Kerja Sama Terstruktur Permanen atau *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) yang dirancang sebagai mekanisme kerja sama pertahanan terintegrasi yang disahkan pada tanggal 11 Desember 2017 di Brussel, Belgia. PESCO didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Lisbon, dengan memungkinkan adanya kolaborasi antar negara-negara anggota dalam proyek-proyek pertahanan dan pengembangan kemampuan militer bersama.

Meskipun Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organizations* – NATO) merupakan kerangka pertahanan kolektif utama bagi Eropa, PESCO dimaksudkan untuk menegaskan otonomi strategis Uni Eropa, terutama di bidang-bidang seperti manajemen krisis dan inovasi teknologi militer. Inisiatif ini juga mencerminkan tren yang lebih luas di dalam Uni Eropa menuju kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih terintegrasi, serta upaya untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan di seluruh negara-negara anggota. Dari paparan diatas, penulis memilih judul ”**Latar Belakang Pembentukan *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) Sebagai Strategi Pertahanan Uni Eropa**”, untuk menganalisis pembentukan PESCO sebagai mekanisme pertahanan terintegrasi Uni Eropa.

B. Latar Belakang Masalah

Pasca Perang Dunia II, Eropa dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam hal pertahanan dan keamanan. Kehancuran dan hilangnya nyawa mengakibatkan wilayah tersebut dalam keadaan tidak stabil. Gagasan untuk mempunyai komunitas keamanan dan pertahanan muncul dengan ditandatanganinya Perjanjian Brussels pada tanggal 17 Maret 1948 oleh Luksemburg, Belanda, Belgia, Prancis, dan Inggris, sebagai penanda komitmen mereka dalam menghadapi ancaman ekspansi Soviet. Selain itu, membentuk aliansi pertahanan kolektif dengan NATO yang secara resmi dibentuk pada 4 April 1949 dengan keikutsertaan dari 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Islandia, Portugal, Kanada, Inggris, Belanda, Luksemburg, Prancis, Italia, dan Belgia (Khaghani, 2015).

Setahun setelahnya, muncul gagasan untuk kembali membentuk proyek militer dengan Komunitas Pertahanan Eropa (*European Defense Community* – EDC) sebagai inisiatif untuk membangun badan keamanan supranasional dan sebagai proyek dalam menciptakan Angkatan Darat Eropa dan mengimbangi pengaruh Soviet. Inisiatif tersebut diusulkan oleh Perdana Menteri Prancis, Rene Plevin, namun, proyek ini gagal pada tahun 1954 karena penolakan oleh Majelis Nasional Prancis akibat munculnya kekhawatiran tentang kontrol supranasional atas pasukan dan munculnya dampak negatif pada kedaulatan masing-masing negara serta adanya NATO yang telah dibentuk sebelumnya pada tahun 1949 (Fiott D., 2017). Upaya Eropa dalam menyediakan kerjasama untuk menciptakan struktur keamanan untuk mencegah konflik di masa depan menyebabkan munculnya motivasi untuk melangkah lebih lanjut ke area kerjasama yang lebih luas. Didorong oleh kebutuhan untuk rekonstruksi ekonomi dan membangun kembali wilayahnya, Robert Schuman, Menteri Luar Negeri Prancis, menggagas pembentukan komunitas dibawah otoritas supranasional dengan Komunitas Batubara dan Baja Eropa (*European Coal and Steel Community* – ECSC) pada tanggal 18 April 1951 dibawah Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Luksemburg, Italia, Prancis, dan Jerman, dan mulai berlaku pada 23 Juli 1952. Pembentukan ECSC dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan

pasar bersama di sektor batu bara dan baja (EUR-Lex, 2017) Selain itu, bertujuan untuk menciptakan institusi yang dapat mengurangi potensi konflik dengan mengelola sumber daya bersama.

Keberhasilan ECSC mendorong untuk perluasan integrasi ekonomi lebih lanjut dengan meresmikan Perjanjian Roma pada tanggal 25 Maret 1957 oleh Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Perjanjian ini membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community* – EEC) untuk bekerja sama menuju integrasi dan pertumbuhan ekonomi, melalui pasar bersama dan penghapusan hambatan perdagangan antar negara-negara anggota (European Council, 2021). Adanya ECSC dan EEC, menjadi gerbang pembuka menuju integrasi Eropa ke sektor-sektor lain. Meskipun terdapat pencapaian ekonomi yang signifikan, tantangan di bidang keamanan dan pertahanan masih belum terselesaikan dan belum cukup terintegrasi. Hal ini diperkuat dengan kondisi Eropa saat itu tengah menghadapi ancaman konflik dari Uni Soviet dan Amerika Serikat pada saat Perang Dingin, sehingga muncul kebutuhan mendesak terhadap integrasi keamanan dan pertahanan.

Oleh karena itu, Eropa juga harus melindungi ketahanan ekonomi kawasan dari berbagai ancaman, baik militer ataupun non-tradisional serta mempertahankan stabilitas keamanan Eropa. Tantangan-tantangan ini mendorong Eropa untuk mengupayakan integrasi yang lebih di sektor kebijakan luar negeri serta sektor keamanan dan pertahanan. Selanjutnya, Eropa membentuk kerangka kebijakan berdasarkan Perjanjian Uni Eropa (*Treaty on European Union* – TEU) atau dikenal dengan Perjanjian Maastricht yang ditandatangani pada 7 Februari 1992 di Maastricht, Belanda, yang diimplementasikan dalam bentuk “pilar” (Berridge & James, 2003) yaitu:

1. *European Community* (EC) sebagai pilar pertama untuk landasan institusi seperti kebijakan ekonomi atau perdagangan dan pasar tunggal;
2. *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) sebagai pilar kedua untuk menerapkan strategi luar negeri dan keamanan bersama;
3. *Justice and Home Affairs* (JHA) sebagai pilar ketiga untuk menetapkan kerjasama di sektor peradilan dan dalam negeri.

Perjanjian ini juga memperkenalkan konsep mata uang Euro yang menjadikan langkah pertama Eropa menuju integrasi moneter dan menjadi tahap kunci dalam sejarah Eropa dalam mengubah komunitas ekonomi menjadi entitas politik yang dinamakan European Union atau Uni Eropa.

Perluasan integrasi ke sektor keamanan dan pertahanan yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui CFSP tersebut didorong oleh kesadaran bahwa kekuatan dari sektor ekonomi tidak bisa dijadikan sebagai kekuatan utama dalam lingkup global, khususnya dalam hal peningkatan keamanan dan pertahanan di lingkungan global yang semakin kompleks. Disamping itu, CFSP memiliki komponen kerja yakni Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (*European Security and Defense Policy – ESDP*). Melalui Deklarasi Saint-Malo yang dikeluarkan oleh Inggris dan Prancis pada bulan Desember 1998, ESDP dijadikan sebagai kerangka kebijakan pertahanan Uni Eropa yang dikembangkan secara signifikan untuk operasi pemeliharaan perdamaian, pencegahan konflik, dan penguatan keamanan internasional, serta menjadi bagian integral dari pendekatan komprehensif Uni Eropa terhadap manajemen krisis dengan memanfaatkan aset sipil dan militer (Kielmansegg, 2019). Pengembangan ESDP berlanjut melalui Perjanjian Lisbon yang ditandatangani pada 13 Desember 2007. ESDP kemudian berganti nama menjadi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (*Common Security and Defence Policy – CSDP*) memungkinkan Uni Eropa untuk mengambil peran dalam operasi pemeliharaan perdamaian, pencegahan konflik, dan penguatan keamanan internasional. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari pendekatan komprehensif Uni Eropa terhadap manajemen krisis, dengan memanfaatkan aset sipil dan militer (EEAS, n.d.).

Di sisi lain, situasi keamanan dan pertahanan Uni Eropa diwarnai dengan adanya aneksasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2014 yang menyebabkan meningkatnya kekhawatiran keamanan di Eropa, khususnya bagi negara-negara Eropa Timur, sehingga menekankan perlunya mekanisme pertahanan kolektif yang lebih kuat. Selain itu, keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak hanya menciptakan ketidakpastian tentang kerja sama di masa depan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi upaya integrasi pertahanan Uni Eropa. Mengingat Inggris secara

historis telah memainkan peran penting dalam kebijakan pertahanan Eropa, baik melalui Uni Eropa maupun NATO. Pada saat yang sama, hubungan Uni Eropa dengan Amerika Serikat era Donald Trump selama masa jabatan pertamanya di tahun 2017 telah memicu ketegangan dalam hubungan transatlantik. Trump berulang kali mengkritik negara-negara anggota NATO di Eropa karena dianggap tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menyumbang 2% dari PDB ke dalam anggaran pertahanan aliansi NATO. Bahkan, Trump sempat mengancam akan menarik pasukan Amerika Serikat dari NATO, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas keamanan Eropa (Dimitrova A. , 2020).

Hingga pada 11 Desember 2017, Dewan Eropa bersama dengan 25 negara anggota Uni Eropa, kecuali Inggris, Malta, dan Denmark, meresmikan Kerja Sama Terstruktur atau *Permanent Structured Cooperation* (PESCO). Berdasarkan Perjanjian Lisbon dalam Pasal 42(6) TEU, PESCO dibentuk oleh negara-negara anggota yang kemampuan militernya telah memenuhi standar yang lebih tinggi dan yang telah membuat komitmen yang lebih mengikat satu sama lain dalam bidang ini dengan maksud untuk misi-misi yang paling berat akan membentuk kerja sama terstruktur yang permanen dalam kerangka kerja pakta pertahanan (Blockmans & Crosson, 2019). Artinya, mekanisme ini menetapkan komitmen yang mengikat secara hukum. Pada saat yang sama, mekanisme ini dirancang sefleksibel mungkin terkait implementasinya, dengan tetap untuk tidak mempengaruhi kedaulatan nasional.

PESCO akan memberikan kemampuan dan kekuatan yang lebih mudah dikerahkan, dapat dioperasikan, dan berkelanjutan, yang juga dimaksudkan sebagai strategi pertahanan, di samping aliansi Uni Eropa dengan NATO. Partisipasi dalam proyek PESCO sendiri didasarkan atas pilihan setiap negara anggota dalam mengerahkan kemampuan dan kekuatannya untuk NATO, PBB, atau organisasi lain yang relevan. Selain itu, untuk mengurangi risiko duplikasi yang tidak perlu, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak akan ada tumpang tindih antara organisasi dan inisiatif yang direncanakan di antara negara-negara anggota yang berpartisipasi. Untuk tujuan ini, Badan Pertahanan Eropa (*European Defence Agency* – EDA) sebagai badan CFSP, bertanggung jawab untuk mendorong

peningkatan kemampuan pertahanan yang akan membantu negara-negara anggota untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang memungkinkan (FINABEL, 2018).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait fenomena yang diteliti adalah “Apa latar belakang pembentukan *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) sebagai strategi pertahanan terintegrasi Uni Eropa pada tahun 2017?”

D. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis mengenai objek dalam penelitian ini. Teori dan konsep yang relevan untuk menganalisa studi kasus “Latar Belakang Pembentukan *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) Sebagai Strategi Pertahanan Uni Eropa” ini adalah konsep limpahan (*spillover*) dalam teori Neo-fungsionalisme yang akan menjawab rumusan masalah mengenai latar belakang pembentukan PESCO sebagai strategi pertahanan Uni Eropa.

1. Teori Neofungsionalisme

Neo-fungsionalisme diperkenalkan pada tahun 1950an oleh Ernst B. Haas dalam bukunya yang berjudul “*The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950- 1957*”. Awalnya teori ini dirumuskan oleh Haas sebagai dasar teoritis mengenai tanggapannya terhadap pembentukan ECSC dan menciptakan literatur akademik mengenai prinsip dalam proses integrasi regional, secara spesifik sebagai teori integrasi Eropa. (Haas, 1958) menyatakan bahwa neofungsionalis berfokus pada pergeseran dalam “proses dimana para aktor politik di beberapa negara yang berbeda diyakinkan untuk mengalihkan loyalitas, harapan dan aktivitas politik mereka ke arah pusat politik yang baru, yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yurisdiksi atas negara-negara yang sudah ada sebelumnya. Hasil akhir dari proses integrasi politik adalah sebuah komunitas politik baru, yang ditumpangkan di atas komunitas politik yang sudah ada sebelumnya.” Teori ini menekankan pada peran institusi supranasional, langkah-

langkah bertahap dalam koordinasi kebijakan dan saling ketergantungan berbagai sektor. Dengan mendorong kerja sama di bidang-bidang seperti perdagangan, energi, atau infrastruktur. Teori ini menyarankan agar negara-negara secara bertahap menyerahkan aspek-aspek kedaulatan mereka kepada otoritas kolektif yang lebih tinggi, sehingga memperkuat proses integrasi lebih dalam di antara negara-negara anggota. Dalam konteks pembentukan mekanisme pertahanan PESCO, pengalaman bersama dari konflik masa lalu, ancaman keamanan yang berkembang dan saling ketergantungan yang diciptakan oleh globalisasi telah menciptakan konteks di mana negara-negara anggota Uni Eropa melihat manfaat dari penggabungan kemampuan dan sumber daya pertahanan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek utama dari PESCO, seperti fokus pada peningkatan kemampuan pertahanan Uni Eropa, membangun kerjasama di antara negara-negara anggota, dan mempromosikan kebijakan pertahanan bersama.

2. Konsep Limpahan (*Spillover*)

Limpahan (*spillover*) merupakan turunan langsung atau mekanisme dari neofungsionalisme yang menyoroti bagaimana integrasi regional di satu bidang kebijakan dapat mengarah pada integrasi di bidang kebijakan lainnya, baik dengan membuka peluang kerja sama maupun dengan menciptakan tantangan yang membutuhkan integrasi lebih lanjut. Hal ini menyebabkan pengalihan otoritas secara bertahap, yang didorong oleh kondisi ekonomi dan politik nasional, dan menghasilkan tekanan-tekanan ke arah integrasi yang lebih jauh yang disebut sebagai limpahan atau *spillover*. Proses tersebut didorong oleh peran dinamis aktor supranasional, yang memfasilitasi efek spillover dengan memediasi kesepakatan dan mempengaruhi birokrat nasional dan kelompok-kelompok kepentingan (Hooghe & Marks, 2019). Terdapat tiga jenis limpahan (*spillover*), antara lain:

1. Limpahan Fungsional (*Functional Spillover*)

Menurut (Niemann, 2016), limpahan fungsional menjelaskan bagaimana integrasi di satu sektor kebijakan mendorong untuk integrasi lanjutan di sektor-sektor lain. Fenomena ini berakar pada saling ketergantungan antara sektor-sektor kebijakan dan sektor-sektor isu pemerintahan dan ekonomi modern, sehingga

menyebabkan dorongan integratif lebih lanjut muncul dan merembes ke bidang-bidang kebijakan lainnya.

2. Limpahan Politik (*Political Spillover*)

Menurut (Tranholm-Mikkelsen, 1991), limpahan ini menjelaskan bagaimana peran aktor-aktor supranasional dan subnasional dalam proses integrasi, dikarenakan dua pihak tersebut menciptakan dorongan lebih lanjut untuk lebih banyak integrasi untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing.

3. Limpahan Dibudidayakan (*Cultivated Spillover*)

Limpahan yang mengacu pada tekanan untuk integrasi lebih lanjut yang diciptakan oleh lembaga-lembaga supranasional. Asumsi yang mendasari adalah bahwa aktor-aktor supranasional, setelah dibentuk, memiliki kehidupan mereka sendiri dan terutama peduli untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, sehingga memberikan dorongan lebih lanjut untuk proses integrasi (Bergmann, 2019).

Berdasarkan ketiga jenis limpahan (*spillover*), yang sesuai kaitannya dengan latar belakang pembentukan PESCO sebagai strategi pertahanan Uni Eropa yaitu limpahan politik (*political spillover*). Tranholm-Mikkelsen menyatakan bahwa limpahan politik menjelaskan bagaimana proses integrasi di satu sektor dapat menciptakan tekanan untuk integrasi lebih lanjut di sektor-sektor yang berdekatan, seringkali melalui tindakan aktor supranasional dan subnasional. Limpahan politik terjadi ketika integrasi di bidang yang dianggap sebagai politik rendah, seperti ekonomi atau perdagangan, menghasilkan kebutuhan akan kerja sama di bidang politik tinggi, termasuk kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Dalam konteks Uni Eropa, aktor supranasional seperti Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (*High Representative of the Union for Foreign and Security Policy/Vice-President of the European Commission – HR/VP*), Layanan Aksi Luar Negeri Eropa (*European External Action Service – EEAS*), Badan Pertahanan Eropa (*European Defense Agency – EDA*), dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (*Common Security and Defence*

Policy – CSDP) tidak hanya menyediakan kerangka hukum dan institusional untuk integrasi, tetapi juga secara terus-menerus mengadvokasi tindakan yang lebih terpadu dalam bidang pertahanan. Institusi-institusi ini berperan penting dalam menyusun proposal, memfasilitasi dialog antar pemerintah, dan memastikan bahwa integrasi pertahanan tetap menjadi bagian dari agenda Uni Eropa. Perjanjian Lisbon, khususnya Pasal 42(6) dan 46 TEU, menjadi landasan hukum bagi PESCO, sementara EDA dan EEAS mendukung realisasi teknis dan operasionalnya. Advokasi dan kapasitas teknis mereka mencerminkan bagaimana lembaga supranasional bertindak sebagai agen integrasi yang lebih dalam, mendorong negara anggota menuju komitmen kolektif.

Pada saat yang sama, aktor subnasional, terutama negara-negara anggota Uni Eropa yang berpengaruh seperti Prancis dan Jerman, memainkan peran katalis dalam mengubah kerja sama pertahanan dari aspirasi bersama menjadi kenyataan institusional. Negara-negara ini memanfaatkan bobot politik dan prioritas strategis mereka untuk mengadvokasi gagasan PESCO sebagai sarana memperkuat otonomi strategis Eropa dalam pertahanan. Ambisi Prancis untuk otonomi strategis dan preferensi Jerman untuk inklusivitas dan multilateralisme menghasilkan usulan bersama untuk “Uni Pertahanan Eropa” pada 2016, yang menjadi pemicu politik pembentukan kerangka PESCO. Kerja sama bilateral mereka, usulan kebijakan bersama, dan upaya diplomatik di dalam Dewan Uni Eropa sangat penting dalam memastikan partisipasi dan komitmen yang luas dari negara-negara anggota lainnya.

Selama periode 2009 – 2017, Uni Eropa menghadapi serangkaian ancaman dan konflik keamanan yang signifikan, seperti aneksasi Krimea, referendum Brexit, dan ketidakpastian hubungan transatlantik di bawah pemerintahan Trump. Perkembangan ini mengungkap kesenjangan kemampuan yang semakin lebar dan hilangnya otonomi strategis, mendorong aktor-aktor Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali ketergantungan mereka pada NATO dan sebaliknya mengejar struktur pertahanan yang independen. Dalam konteks ini, Prancis dan Jerman muncul sebagai aktor politik kunci yang mendorong integrasi pertahanan Eropa. Usulan bersama Prancis-Jerman pada 2016 tentang penguatan

pertahanan UE merupakan contoh inisiatif bilateral yang menunjukkan bagaimana preferensi nasional beralih ke kerja sama regional ketika alat nasional terbukti tidak memadai. Secara bersamaan, badan-badan supranasional mulai mendorong langkah-langkah spesifik. Strategi Global UE 2016, yang dipimpin oleh HR/VP Federica Mogherini, secara tegas menyerukan Uni Eropa yang lebih “kredibel dan responsif” di bidang pertahanan dan keamanan.

Melalui interaksi antara aktor supranasional dan subnasional ini, dampak politik membentuk arah integrasi pertahanan UE melalui PESCO berlandaskan Pasal 42(6) TEU dan Protokol No. 10, yang menyediakan kerangka hukum yang mengikat namun fleksibel. Ketergantungan yang semakin meningkat antara negara anggota dalam menghadapi tantangan keamanan, serta ketidakmampuan untuk merespons melalui mekanisme nasional atau antar pemerintah saja, mempercepat pergeseran ekspektasi dan loyalitas dari institusi nasional ke institusi Eropa. Dalam kasus Uni Eropa, pembentukan PESCO dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari limpahan tersebut, di mana mekanisme institusional dan negara anggota yang berpengaruh memainkan peran kunci dalam mendorong kerja sama pertahanan. Pembentukan PESCO bukan hanya respons mendadak terhadap ancaman eksternal, melainkan mencerminkan dinamika internal integrasi yang berkelanjutan, manifestasi dari limpahan politik, dimana baik institusi maupun negara anggota yang kuat bersatu untuk memenuhi kebutuhan kolektif melalui kerja sama yang lebih dalam.

E. Argumen Pokok

Argumen pokok dari penelitian ini adalah pembentukan *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) didasarkan pada konsep limpahan politik (*political spillover*), di mana ancaman keamanan regional serta konflik dengan Amerika Serikat, mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk memperdalam kerja sama pertahanan terintegrasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut (Dr. J. R. Raco, 2010) merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, dan memiliki tujuan yang pasti, baik secara teoritis maupun praktis. Karena merupakan penelitian dengan komponen ilmiah dan teoritis maka disebut sebagai kegiatan ilmiah, serta teorganisir karena penelitian perlu direncanakan dengan pertimbangan waktu, dana, dan aksesibilitas lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Creswell, 2014), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau fenomena manusia. Pendekatan ini mengandalkan data teks dan gambar dengan melibatkan pemilihan dari sekumpulan sumber data yang terus berkembang, menggunakan protokol khusus untuk pengumpulan data, dan menganalisis informasi melalui beberapa tahap untuk mendokumentasikan keakuratan data yang dikumpulkan. Setelah data terkumpul, peneliti menginterpretasikan maknanya untuk mendapatkan temuan yang lebih luas. Hasil penelitian disusun secara fleksibel, yang mencerminkan pendekatan induktif yang menekankan pada makna individu dan kompleksitas situasi tertentu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan data yang akurat dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Penulis menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan referensi dari dokumen berupa artikel, jurnal, buku, skripsi, laporan, media cetak maupun media elektronik lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Bogdan dalam (Hardani & dkk, 2020) merupakan proses menyusun lalu memproses data yang didapat dari catatan lapangan, wawancara, dan berbagai dokumen lainnya. Proses ini meliputi kategorisasi data, pembagiannya menjadi unit-unit yang lebih kecil, identifikasi pola-pola yang muncul, pemilihan data yang relevan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan perumusan kesimpulan. Tujuannya untuk memfasilitasi pemahaman data yang dikumpulkan dengan cara yang dapat dipahami.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait analisis latar belakang pembentukan *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) sebagai strategi pertahanan Uni Eropa.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat dengan memperkaya diskusi mengenai integrasi Uni Eropa terutama di bidang keamanan dan pertahanan. Dengan perspektif neofungsionalisme dan konsep limpahan (*spillover*) penelitian ini menambah pengetahuan mengenai pembentukan PESCO pada tahun 2017 sebagai strategi pertahanan Uni Eropa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam urusan bidang keamanan dan pertahanan di Eropa. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan PESCO, tantangan yang dihadapinya, dan potensi dampaknya terhadap otonomi pertahanan Uni Eropa.

3. Manfaat Studi Lanjutan

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional pada universitas serta dapat menjadi acuan bagi penelitian

selanjutnya yang akan membahas isu-isu keamanan dan pertahanan khususnya di kawasan Eropa.

H. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menetapkan batasan dalam penelitian ini dengan berfokus pada transformasi kebijakan pertahanan Uni Eropa setelah Perjanjian Lisbon sehingga mengarah pada pembentukan PESCO sebagai strategi pertahanan terintegrasi milik Uni Eropa. Batas penelitian ini antara tahun 2009 dan tahun 2017. Batasan penelitian pada tahun 2009 menandai diberlakukannya Perjanjian Lisbon yang memperkenalkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk CFSP oleh Uni Eropa, sehingga memungkinkan terciptanya PESCO. Sementara batasan penelitian pada tahun 2017 menandakan peluncuran resmi dari PESCO, ini mewakili puncak dari upaya politik dan strategis mengenai integrasi pertahanan Uni Eropa. Dengan membatasi jangka waktu pada periode khusus ini, penelitian ini memastikan analisis yang terfokus pada latar belakang pembentukan PESCO.

I. Sistematika Penelitian

Pada penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab, dengan tiap sub-bab yang disesuaikan dengan penjelasan fenomena atau masalah yang dianalisis, yaitu:

BAB I, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen pokok, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, menguraikan mengenai perkembangan sejarah dan kelembagaan kerja sama pertahanan Uni Eropa. menjelaskan pembentukan PESCO, mencakup mekanisme kelembagaan dan implementasinya, serta profil negara-negara anggota kontributor dalam PESCO.

BAB III, menguraikan latar belakang pembentukan PESCO dalam konteks geopolitik Uni Eropa; mencakup ancaman dan konflik yang dihadapi Uni Eropa pada periode 2009 – 2017.

BAB IV, berisi kesimpulan dari temuan-temuan penelitian.

BAB II

DINAMIKA KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PERTAHANAN UNI EROPA DAN PEMBENTUKAN MEKANISME KERJA PESCO SERTA PROFILE NEGARA KONTRIBUTOR

Pada BAB II memaparkan landasan konseptual mengenai sejarah pertahanan Uni Eropa sebagai organisasi supranasional, dilanjutkan dengan pemaparan mengenai upaya pemenuhan kebutuhan kerangka kerja sama pertahanan di Uni Eropa melalui *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) meliputi mekanisme dan kelembagaan PESCO serta negara-negara anggota kontributor dalam PESCO.

A. Evolusi Kelembagaan Kerja Sama Pertahanan Uni Eropa

Evolusi kelembagaan kerja sama pertahanan Uni Eropa mencerminkan pergeseran yang bertahap namun signifikan dari dialog informal ke integrasi yang terstruktur. Melalui Deklarasi St. Malo Perancis-Inggris pada tahun 1998, dengan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, bersama Presiden Prancis, Jacques Chirac, mengakui pentingnya bagi Uni Eropa untuk memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang otonom dan kemampuan militer operasional untuk merespons kritik internasional (CVCE, 2015). Deklarasi ini tidak hanya mengakui pentingnya NATO dan *Western European Union* (WEU) tetapi juga menghidupkan kembali komitmen Uni Eropa dalam otonomi pertahanan setelah adanya kekurangan yang ditunjukkan selama konflik Kosovo (Pannier, 2021). Faktor-faktor tersebut menimbulkan dorongan politik yang diperlukan untuk pembentukan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (*European Security and Defense Policy* – ESDP) yang secara resmi diresmikan pada tahun 1999 di bawah naungan kerangka kerja *Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum* (*Common Foreign and Security Policy* – CFSP).

Deklarasi Laeken pada tahun 2001 memberikan dorongan lebih lanjut dengan memprakarsai Konvensi Masa Depan Eropa (*Convention on the Future of Europe* – CFREU). Tujuan konvensi tersebut adalah untuk menghasilkan suatu rancangan konstitusi bagi Uni Eropa yang dilaksanakan dengan suatu kelompok kerja

pertahanan di bawah arahan Komisaris Eropa saat itu, Michel Barnier. Dalam laporan akhir Kelompok Kerja VIII, yang dirilis pada bulan Desember 2002, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusan dan operasi militer. Dalam hal ini, CFREU merekomendasikan “kerja sama yang lebih erat” di antara negara anggota yang berkinerja terbaik dalam hal operasional – sebuah “zona euro pertahanan” yang berdiri sendiri, serta peluncuran *European Armaments and Strategic Research Agency* (Consilium Europa, 2002).

CFREU juga memanfaatkan kesempatan untuk mengubah ketentuan yang ada mengenai ‘kerja sama yang diperkuat’ guna menurunkan ambang batas bagi negara anggota yang berpartisipasi dan mempercepat prosedur aktivasi. Akhirnya, kesepakatan luas tercapai dalam Konvensi mengenai pemeliharaan ketentuan yang ada tentang “kerja sama yang diperkuat.” Namun, ambang batas dikurangi dari delapan menjadi sepertiga dari negara anggota (saat itu 15, tetapi segera menjadi 25 negara anggota). Ketentuan ini juga mencakup pasal tentang “kerja sama yang lebih erat” (Pasal I-40.7 dan III-214) yang agak membingungkan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi apa yang kini dikenal sebagai “klausul bantuan timbal balik” (saat ini Pasal 42.7 TEU). Konvensi tersebut juga menghapus segala referensi terhadap WEU, mengusulkan pembentukan “*European Armaments, Research and Military Capabilities Agency*” (Pasal I.40.3) — yang mengarah pada pembentukan Badan Pertahanan Eropa (*European Defence Agency* – EDA) pada tahun 2004 — dan menetapkan bahwa UE dapat “menugaskan pelaksanaan suatu tugas kepada sekelompok negara anggota” (Pasal I.40.5 dan III-211). Yang patut diperhatikan adalah pengenalan bentuk kerja sama terstruktur baru dalam Rancangan Konstitusi 2003, yang khusus ditujukan untuk pertahanan (Pasal I-40.6 dan III-213). Bentuk kerja sama baru ini memungkinkan negara anggota yang memenuhi kriteria kemampuan militer yang lebih tinggi untuk mengambil komitmen yang lebih mengikat untuk tugas-tugas yang paling menuntut.

Selanjutnya, perjanjian Konstitusional (*Treaty of the Constitution of Europe* - TCE) ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2004, untuk memberikan Uni Eropa landasan hukum tunggal dan terkonsolidasi. Sebagian besar ketentuannya dipertahankan meskipun perjanjian ini tidak diratifikasi akhirnya. Ketentuan

dimana mengizinkan kelompok-kelompok negara anggota untuk menjalankan misi-misi tertentu (Pasal I-41.5 dan III-310) tetap dipertahankan dan kemudian ditetapkan menjadi Pasal 44 TEU. Tetapi, terdapat penambahan konsep “kerja sama terstruktur” dan ditambah dengan penambahan istilah “permanen” (Pasal I-41.6 dan III-312) yang dimaksudkan untuk menyelaraskannya dengan Uni Moneter Eropa (*European Monetary Union* – EMU). Sebuah protokol khusus (Protokol No. 23) juga diperkenalkan untuk mendefinisikan strukturnya secara lebih rinci. Protokol ini menegaskan bahwa Kerja Sama Terstruktur Permanen akan terbuka untuk semua negara anggota yang memenuhi kriteria kemampuan operasional, terutama yang berkaitan dengan konsep “*Battlegroup*” (Fiott, Missiroli, & Tardy, 2017).

Selanjutnya, EDA diimplementasikan pada tahun 2004 melalui *Council Joint Action* 2004/551/CFSP. Badan ini didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan dukungan kepada negara-negara anggota dalam peningkatan kemampuan militer, fasilitasi penelitian dan pengembangan pertahanan, dan koordinasi pengadaan pertahanan. Landasan hukum EDA terletak pada Pasal 42(3) TEU, yang menetapkan kewajiban negara-negara anggota untuk secara progresif meningkatkan kemampuan militer mereka. Badan ini memainkan peran penting dalam mengidentifikasi persyaratan operasional, mempromosikan langkah-langkah pengembangan kemampuan, berkontribusi pada penguatan industri pertahanan, dan membantu Dewan dalam evaluasi peningkatan militer (Caranta, 2023).

Perjanjian Lisbon yang diresmikan pada 2009 merupakan titik balik yang signifikan karena secara resmi mengakui berbagai klausul yang berhubungan dengan pertahanan yang sebelumnya tidak memiliki otoritas kelembagaan. Perjanjian Lisbon tidak hanya memperkenalkan klausul solidaritas (Pasal 222 TFEU) dan klausul bantuan timbal balik (Pasal 42(7) TEU), tetapi juga secara resmi mengkodifikasikan Kerja Sama Terstruktur Permanen di bawah Pasal 42.6 dan 46 TEU, yang didukung oleh Protokol No. 10. Ketentuan-ketentuan ini memungkinkan sekelompok negara anggota tertentu untuk berkolaborasi lebih mendalam dalam masalah pertahanan, bergantung pada pemenuhan kriteria kemampuan yang lebih tinggi dan menunjukkan kemauan untuk melakukan misi yang lebih sulit. Perjanjian Lisbon juga melembagakan posisi Perwakilan Tinggi

Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (*High Representative of the Union for Foreign and Security Policy/Vice-President of the European Commission* – HR/VP) dan Dinas Luar Negeri Eropa (*European External Action Service* – EEAS). Dengan demikian, hal ini berdampak pada penguatan kapasitas Uni Eropa untuk memproyeksikan kekuatan melalui instrumen diplomatik dan pertahanan (Anghel & Bacian, 2016).

Inisiatif-inisiatif berikutnya berfungsi untuk lebih memperkuat landasan hukum dan kelembagaan ini. Dewan Keamanan dan Pertahanan tahun 2013 menggarisbawahi perlunya meningkatkan efektivitas, visibilitas, dan dampak CSDP, dengan menyerukan peningkatan investasi dalam kemampuan dan penelitian pertahanan. Pada bulan Juni 2016, HR/VP Uni Eropa, Frederica Mogherini, telah diterbitkan sebuah dokumen dengan judul resmi “*Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe—A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy*” yang sekarang disebut dengan Strategi Global Uni Eropa (*European Union Global Strategy* – EUGS). EUGS berpusat pada perlunya Eropa yang kuat yang menggunakan pemikiran strategis, berbagi visi yang sama, dan beroperasi secara kohesif. Dokumen rencana pertahanan ini menggantikan Strategi Keamanan Eropa (*European Security Strategy*) yang lama dari tahun 2003 dan yang perlu untuk diperbarui.

Rencana baru ini akan mencakup prioritas tambahan untuk keamanan dan pertahanan. Rencana ini diikuti pula dengan Rencana Implementasi Keamanan dan Pertahanan (*Implementation Plan on Security and Defence*) pada bulan November 2016 sebagai serangkaian tindakan nyata untuk keamanan dan pertahanan (Brattberg & Valasek, 2019). Rancangan inilah yang nanti dikenal sebagai PESCO. Konsep PESCO sendiri baru diperkenalkan setelah serangkaian pertemuan antara Menteri luar negeri dan Menteri pertahanan Uni Eropa. PESCO diusulkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam EUGS, menyusul permintaan Komisi Eropa pada Desember 2016 untuk mengeksplorasi elemen dan opsi untuk PESCO yang inklusif (FINABEL, 2018).

B. Pembentukan dan Mekanisme Kerja PESCO

Pembentukan PESCO pada tahun 2017 menjadi momen penting dalam lingkup integrasi pertahanan Eropa. Kerja sama ini tidak hanya merupakan hasil dari perkembangan institusional di dalam Uni Eropa, tetapi juga didorong kuat oleh kepemimpinan Prancis dan Jerman. Sebagai dua negara anggota paling berpengaruh dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Eropa, kedua negara tersebut memainkan peran kunci dalam membangkitkan kembali momentum untuk integrasi pertahanan lebih dalam setelah implementasi EUGS 2016.

Awalnya, Prancis mengejar tujuan militer yang ambisius dalam pengembangan kebijakan keamanan dan pertahanan Uni Eropa dengan menginisiasi PESCO. Tujuannya adalah memperkuat kemampuan militer negara-negara peserta agar dapat melaksanakan operasi manajemen krisis di wilayah selatan (Timur Tengah dan Afrika) menggunakan instrumen, struktur, dan sumber daya keuangan Uni Eropa. Sedangkan menurut pandangan Jerman, dimensi politik dari pendekatan untuk menginisiasi PESCO tercermin dalam keinginan negara ini untuk mendukung inisiatif Prancis dalam integrasi Eropa yang lebih erat setidaknya di salah satu bidang, serta untuk menunjukkan fungsi tandem Prancis-Jerman dalam Uni Eropa. Keinginan Berlin ditunjukkan kepada administrasi AS yang baru bahwa Eropa bersedia untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanannya dan mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk peningkatan kerja sama militer. Demikian pula, konsep “Uni Pertahanan Eropa” dipandang lebih positif di Jerman daripada argumen untuk memperkuat NATO, yang tidak populer karena sentimen anti-Amerika di masyarakat Jerman. Selain itu, isu penguatan kolaborasi industri di sektor pertahanan dalam Uni Eropa juga sangat penting, karena dianggap menguntungkan bagi perusahaan senjata Jerman. Namun, Jerman secara efektif menolak usulan Prancis untuk mendirikan pasukan elit militer Uni Eropa dalam kerangka PESCO demi menghindari adopsi format apa pun yang akan memberlakukan kewajiban politik dan militer yang mengikat. Hal ini untuk mencegah kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan militer Bundeswehr di Afrika atau Timur Tengah. Jerman juga menentang pembentukan divisi tambahan

di Uni Eropa yang akan mengakibatkan pengucilan negara-negara anggota Eropa Tengah (Gotkowska, 2018).

Selain itu, Italia dan Spanyol juga merupakan pendukung penguatan kerja sama pertahanan Eropa, terutama karena situasi keamanan yang memburuk di perbatasan selatan mereka, yang berdampak pada keamanan internal mereka. Spanyol memandang PESCO sebagai upaya menuju integrasi pertahanan Uni Eropa yang lebih kuat, tetapi mengadvokasi kerangka kerja inklusif yang memungkinkan partisipasi luas di antara negara-negara anggota, daripada membatasinya hanya pada aktor-aktor yang memiliki kemampuan tinggi. Namun, di sisi lain, Spanyol mengingatkan bahwa PESCO harus tetap menjadi pelengkap NATO, selaras dengan pandangan pertahanan Atlantik (Arteaga, 2018).

Menurut (Marrone, 2018), Italia memandang PESCO tidak hanya sebagai mekanisme kebijakan pertahanan Uni Eropa, tetapi sebagai alat inovasi pertahanan nasional yang krusial untuk menyelaraskan basis industri pertahanan Italia dengan pendanaan dan peluang penelitian tingkat Uni Eropa. Meskipun Italia tidak menekankan hubungan antara PESCO dengan konsep negara kerangka NATO, yaitu prinsip dasar dan struktur NATO, Italia menganggap kesuksesan PESCO saling terkait dengan mekanisme koordinasi tingkat Uni Eropa yang lebih luas seperti Dana Pertahanan Eropa (*European Defence Fund – EDF*) dan Tinjauan Tahunan Terkoordinasi tentang Pertahanan (*Coordinated Annual Review on Defence – CARD*). Penting juga bagi negara-negara ini untuk berusaha “membagi beban” dalam menyelesaikan masalah bersama dengan anggota Uni Eropa lainnya. Swedia, Finlandia, Negara-negara Baltik, dan Rumania juga sangat mendukung potensi pengembangan inisiatif pertahanan baru, tetapi lebih berhati-hati terhadap isu komando militer Uni Eropa yang otonom dan inisiatif lain yang mungkin mempertanyakan manfaat NATO di Eropa. Semua negara ini lebih memilih untuk menghindari fragmentasi lebih lanjut Uni Eropa sekaligus mempertahankan peran kepemimpinan NATO dalam pertahanan Eropa (Varga, 2017).

Akan tetapi, dalam prosesnya muncul perbedaan aspirasi antara Prancis dan Jerman mengenai PESCO sebelum diresmikan pada 2017. Dengan penekanan pada peran ambisius PESCO, Prancis memandangnya sebagai instrumen untuk efisiensi

operasi yang diarahkan pada otonomi strategis Uni Eropa, menghargai ambisi meskipun hal ini mengarah pada pengurangan jumlah negara-negara anggota yang melakukan tindakan militer yang krusial. Sebaliknya, Jerman menekankan pentingnya inklusivitas dalam PESCO untuk integrasi lebih lanjut yang aktif dalam pertahanan Eropa dan bertujuan untuk mencegah perpecahan dalam fondasi kerangka kerja pertahanan bersama di Uni Eropa (Koenig & Walter-Franke, 2017).

Dalam sebuah pernyataan bersama yang diterbitkan tak lama setelah referendum Brexit pada bulan Juni 2016, menteri luar negeri Prancis dan Jerman (Steinmeier & Ayrault, 2016) menyerukan kerja sama yang lebih kuat dalam kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa, termasuk pertahanan Eropa yang lebih terintegrasi dengan mengusulkan implementasi perdana pada ketentuan Perjanjian Lisbon tentang kerja sama terstruktur permanen yaitu Pasal 42(6) dan 46 TEU dalam urusan militer. Hal ini memfasilitasi pembentukan kelompok negara anggota yang berkomitmen pada kriteria ketat terkait peningkatan kemampuan pertahanan mereka, selain partisipasi dalam program peralatan Eropa dan pasukan multinasional.

Pada September 2016, dua menteri pertahanan, Le Drian dan von der Leyen, ikut mengajukan rancangan laporan kontribusi bersama yang substansial, yang menggambarkan peta jalan menuju revitalisasi CSDP. Selain mendorong pembentukan kerja sama terstruktur permanen, laporan tersebut menyerukan implementasi serangkaian langkah, termasuk pengembangan kemampuan perencanaan dan pelaksanaan militer dan sipil Uni Eropa yang permanen, penyelenggaraan pertemuan Dewan Eropa secara teratur untuk membahas masalah keamanan dan pertahanan, penguatan pembiayaan untuk misi CSDP misalnya dengan menetapkan 20% dari pengeluaran pertahanan untuk investasi pertahanan, serta pembentukan infrastruktur transportasi strategis Eropa dan Komando Medis Eropa (Schild & Krotz, 2018).

Rencana penguatan pertahanan Uni Eropa kembali dilakukan pada Pertemuan Menteri Prancis-Jerman ke-19 pada Juli 2017, dimana Prancis dan Jerman mengumumkan peluncuran inisiatif Eropa untuk mendukung pembentukan kerja sama terstruktur permanen yang ambisius dan inklusif di mana negara-negara

anggota Uni Eropa dapat membuat komitmen yang lebih mengikat pada misi yang paling menuntut, mengumumkan beberapa proyek bersama, seperti pengawasan maritim Eropa dan program Eurodrone, dan menekankan komplementaritas PESCO dengan NATO (Koenig & Walter-Franke, 2017).

Berdasarkan dorongan Prancis-Jerman ini, PESCO secara resmi didirikan pada 11 Desember 2017 melalui *Council Decision* (CFSP) 2017/2315. Berlandaskan Pasal 42(6) dan 46 TEU, bersama dengan Protokol No. 10, bahwa PESCO memberikan kerangka kerja yang mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang bersedia dan mampu untuk bersama-sama dalam pengembangan kemampuan pertahanan, investasi dalam proyek-proyek bersama, dan peningkatan kesiapan operasional angkatan bersenjata mereka. Selain itu, PESCO mewakili pergeseran ke arah model kerja sama yang lebih terstruktur dan berbeda, di mana keanggotaannya tergantung pada pemenuhan komitmen khusus dalam pengeluaran pertahanan, pengembangan kapabilitas, dan penyelarasan strategis.

Dalam rangka berjalannya implementasi kerja sama ini diperkuat oleh langkah-langkah kelembagaan yang dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara anggota yang berpartisipasi mematuhi komitmen bersama dan memenuhi kewajiban mereka. Dewan Uni Eropa melalui Lampiran II dalam *Council Decision* (CFSP) 2017/2315, mencantumkan 20 komitmen yang mengikat bagi negara-negara yang berpartisipasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen ini dipresentasikan dalam Rekomendasi Dewan pada 6 Maret 2018, yang menjelaskan struktur tata kelola, jadwal, dan mekanisme evaluasi untuk implementasi. Dalam Pasal 1 Protokol No. 10 disebutkan bahwa PESCO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42(6) TEU, terbuka untuk setiap Negara Anggota yang bersedia dan berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas pertahanan dan memiliki kemampuan untuk memasok pasukan dan peralatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 1, Negara-negara Anggota yang berpartisipasi dalam kerja sama terstruktur permanen harus berusaha untuk (Blockmans & Crosson, 2021):

1. Bekerja sama dengan maksud untuk mencapai tingkat pengeluaran investasi yang lebih tinggi untuk peralatan pertahanan dengan mempertimbangkan, antara lain, komitmen internasional, khususnya dengan NATO;
2. Aparat pertahanan harus diselaraskan dengan mengidentifikasi kebutuhan militer, menyatukan dan mengkhususkan kemampuan, dan mendorong kerja sama dalam peralatan dan kemampuan;
3. Mengambil langkah-langkah konkret untuk memobilisasi kekuatan;
4. Mengurangi ketimpangan dan kesenjangan kemampuan; dan
5. Berpartisipasi dalam program-program gabungan atau dalam level Eropa dalam kerangka EDA.

Dalam Lampiran II tersebut juga mencakup penyelarasan rencana pertahanan nasional dengan tujuan Uni Eropa, peningkatan investasi pertahanan hingga 2% dari PDB, dan pengembangan bidang strategis seperti pertahanan siber, transportasi strategis, dan dukungan medis (Rutigliano, 2023). Selain itu, melalui pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri (Pertahanan) di waktu yang sama, para menteri pertahanan Uni Eropa mengadopsi Peta Jalan Implementasi PESCO, yang menetapkan seperangkat pedoman strategis untuk tata kelola, koordinasi, dan evaluasi proyek-proyek PESCO, dengan penekanan khusus pada harapan bahwa negara-negara anggota akan memenuhi komitmen mereka yang mengikat (European Council, 2018). Berkenaan dengan tata kelola proyek PESCO lebih lanjut di bawah *Council Decision* (CFSP) 2018/909, yang memperkenalkan aturan umum mengenai implementasi proyek, kewajiban pelaporan, prosedur evaluasi, dan kriteria keanggotaan. Struktur tata kelola PESCO terdiri dari dua tingkat, yaitu tata kelola pertama adalah Dewan di bawah format PESCO, dimana keputusan dibuat dengan suara bulat. Lalu, tata kelola kedua adalah tingkat proyek tertentu, dalam hal ini, struktur tata kelola untuk setiap proyek ditentukan dan diatur oleh negara-negara anggota yang berpartisipasi (EUR-Lex, 2017).

Kemudian dalam hal koordinasi proyek, merupakan tanggung jawab negara pemimpin yang ditunjuk, yang bertugas melaporkan kemajuan, memastikan sinergi dengan inisiatif lain, dan menjaga komunikasi dengan Sekretariat PESCO.

Sekretariat saat ini, yang terdiri dari EDA, EEAS dan Staf Militer Uni Eropa (*European Union Military Service – EUMS*), memenuhi fungsi penting dalam pemantauan dan fasilitasi kerja sama. Selain itu dalam *Council Decision* (CFSP) 2018/909, model tata kelola memungkinkan negara anggota yang tidak terlibat secara aktif dalam proyek tertentu untuk memiliki status pengamat, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan interoperabilitas di antara prioritas pertahanan nasional yang berbeda (EUR-Lex, 2018). Dalam hal penentuan utama mengenai operasi keseluruhannya, serta administrasi inisiatif tertentu, akan dibuat oleh menteri luar negeri dan menteri pertahanan (Fiott, Missiroli, & Tardy, 2017).

Gambar II. 1
17 Proyek PESCO Pada Gelombang Pertama Periode 2018 - 2019



Sumber: *Another 17 PESCO Projects Approved*. <https://finabel.org/another-17-pesco-projects-approved-2/>. Diunduh pada 29 Mei 2025.

Berdasarkan Gambar II.1, pada tahap implementasi awal PESCO menyetujui 17 proyek pertahanan kolaboratif pada Desember 2017, yang mencakup program pelatihan bersama mengenai kemampuan pertahanan siber, mobilitas militer hingga operasi tanggap krisis. Selanjutnya, 17 proyek di gelombang kedua pada November 2018 dan 13 proyek di gelombang ketiga pada November 2019, menghasilkan total

kumulatif 47 proyek. Setelah peluncuran putaran ketiga proyek, HR/VP Federica Mogherini, menyatakan bahwa fokus saat ini akan diarahkan pada implementasi proyek-proyek tersebut (Peruzzi, 2019). Implementasi PESCO juga bergantung pada sinergi dengan instrumen keuangan dan strategis Uni Eropa lainnya. Tinjauan Tahunan Terkoordinasi tentang Pertahanan (*Coordinated Annual Review on Defence* – CARD), yang diluncurkan pada tahun 2017, dan Dana Pertahanan Eropa (*European Defence Fund* – EDF), yang disepakati di bawah Kerangka Kerja Keuangan Multiannual (*Multiannual Financial Framework* – MFF) 2021-2027 dengan alokasi €7.9 miliar, memberikan dukungan kelembagaan dan keuangan untuk inisiatif pengembangan kapasitas serta memastikan bahwa negara-negara anggota memenuhi komitmennya (Blockmans & Crosson, 2021). Dengan adanya instrumen keuangan melalui EDF, dapat memperkuat ambisi strategis Uni Eropa yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan fundamental PESCO.

C. Profile dan Kontribusi Negara Anggota Serta Tantangan Implementasi PESCO

Implementasi yang efektif dari PESCO tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum dan kelembagaan yang ditetapkan oleh Uni Eropa, tetapi juga pada keterlibatan aktif dan komitmen masing-masing negara anggota. Sejak diresmikan pada Desember 2017, 25 dari 28 negara anggota Uni Eropa, antara lain: Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Estonia, Finlandia, Prancis, Spanyol, dan Swedia, kecuali Denmark, Malta, dan Inggris, ikut berpartisipasi dalam PESCO yang menandakan dukungan kolektif yang kuat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan yang lebih dalam. Sesuai dengan Pasal 42(6) TEU, PESCO berfungsi sebagai perwujudan integrasi yang berbeda, di mana hanya negara-negara anggota yang bersedia dan mampu untuk berpartisipasi. (Aydin-Duzgit & Marrone, 2018).

Partisipasi dalam PESCO juga bergantung pada pemenuhan kriteria tertentu oleh negara-negara anggota. Kriteria ini mencakup peningkatan belanja pertahanan, komitmen terhadap pengembangan kemampuan bersama, dan penyelarasan

perencanaan pertahanan nasional dengan prioritas tingkat Uni Eropa. Melalui Rencana Implementasi Nasional (*National Implementation Plans – NIPs*), negara-negara anggota menguraikan strategi mereka untuk memenuhi komitmen ini, memfasilitasi peninjauan berkala dan mendorong transparansi (Jopp & Schubert, 2019). Di samping itu, sifat kontribusi setiap negara anggota sangat bervariasi, mencerminkan perbedaan dalam prioritas strategis, kemampuan militer, dan kemauan politik.

Negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, dan Italia sering kali mengambil peran kepemimpinan dalam koordinasi proyek dan pengembangan konseptual, sementara negara-negara yang lebih kecil berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Prancis mengakui bahwa awalnya negaranya tidak banyak berkontribusi pada gelombang pertama proyek PESCO, namun, investasi dari Prancis telah meningkatkan skala dan ambisi proyek-proyek tersebut. Akan tetapi, Prancis kini menjadi negara Eropa yang berpartisipasi dalam jumlah proyek terbanyak dengan total dua puluh satu proyek, di samping Italia. Ini merupakan upaya multinasional untuk helikopter Tigre Mk III, rudal anti-tank jarak menengah, jaringan pusat uji coba Eropa, sistem navigasi radio Eropa di masa depan, dan pengerahan kontingen secara bersama-sama. Yang lebih penting, saat ini Eropa telah banyak berinvestasi dalam proyek-proyek yang mengisi beberapa kekosongan kemampuan Eropa, dan memiliki potensi untuk memiliki konsekuensi struktural bagi otonomi strategis benua itu. Salah satunya yakni MALE RPAS (Eurodrone), yang akan mengisi kesenjangan signifikan yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2000-an, yang melibatkan mitra utama Uni Eropa, Jerman, Italia, dan Spanyol (France O. D., 2019).

Jerman sebagai partisipan aktif kedua setelah Prancis, mengkoordinasikan enam proyek yang berfokus pada kompetensi dan tugas-tugas pendukung dan termasuk *European Medical Command*, *Logistics Network for EU Operations* dan *EU Center of Excellence for Training Missions* (EU TMCC). Selain itu, Jerman terlibat sebagai koordinator proyek dalam arsitektur dukungan penyebaran geometeorologi dan oseanografi (GeoMETOC) serta dalam proyek “Eurodrone” yang telah lama dikoordinasikan dengan keberhasilan yang cukup baik dalam kerangka

kerja EDA dan sekarang telah dimasukkan ke dalam kerangka PESCO (Jopp & Schubert, 2019). Selain itu, Menteri Pertahanan, Ursula von der Leyen, menyampaikan bahwa Jerman ingin mengembangkan proyek-proyek dibawah PESCO, antara lain pusat koordinasi untuk layanan medis, jaringan logistik, pelatihan bersama untuk perwira militer, pusat keunggulan untuk misi pelatihan Uni Eropa, unit helikopter dan pesawat angkut bersama (Gotkowska J. , 2017).

Belgia sendiri berpartisipasi dalam lima proyek, yakni *European Secure Software defined Radio* (ESSOR), *Network of Logistic Hubs in Europe*, *Simplifying and standardising cross-border military transport procedures*, *Energy Operational Function* (EOF), *European Union Training Mission Competence Centre* (EUTMCC) dan memiliki status pengamat di empat proyek, yaitu satu untuk pengawasan pelabuhan, satu untuk pasukan darat, dan dua untuk pertahanan siber (Santopinto, 2018). Di sisi lain, terdapat beberapa negara yang kurang partisipasinya di dalam PESCO, misalnya Ceko dan Portugal yang memiliki populasi dan PDB yang sama besarnya serta memiliki industri pertahanan yang kuat sebagai pengeksport persenjataan teratas di dunia. Selama tiga gelombang pertama proyek PESCO hingga 2021, diketahui Ceko hanya memimpin satu proyek dan berpartisipasi dalam enam proyek lainnya. Hanya lima perusahaan Ceko yang berpartisipasi dalam konsorsium proyek yang memenangkan pendanaan *European Defence Industrial Development Programme* (EDIDP) dan dua perusahaan tambahan didukung oleh *Preparatory Action on Defence Research* (PADR). Sebaliknya, Portugal relatif pasif selama negosiasi PESCO dan EDF; pemerintah Portugal hanya mengumumkan partisipasinya dalam PESCO sebulan setelah diluncurkan. Namun, periode 2021, Portugal telah memimpin dua proyek PESCO dan berpartisipasi dalam delapan proyek lainnya. Tujuh belas entitas Portugal memenangkan pendanaan EDIDP, dan salah satu konsorsium bahkan dipimpin oleh Portugal, sebuah keberhasilan yang sejauh ini belum pernah dicapai oleh kelompok-kelompok dari Ceko. Selain itu, entitas-entitas Portugal telah berpartisipasi dalam lima proyek yang didanai PADR (Weiss, Fernandes, & Pisklova, 2024).

Di samping itu, keterlibatan negara-negara Baltik terfokus pada sejumlah bidang spesifik, mencerminkan minat mereka pada sistem otonom, siber, dan

teknologi digital. Namun, mereka juga berkontribusi pada bidang logistik dan maritim. Dalam bidang sistem otonom, Estonia memegang peran koordinasi dalam tiga dari empat proyek yang diikuti, selain satu proyek di bidang siber. Demikian pula, Lithuania memainkan fungsi koordinasi dalam salah satu proyek siber. Inisiatif ini mencerminkan bidang-bidang di mana ketiga negara tersebut bercita-cita untuk berspesialisasi dan mengembangkan kompetensi perusahaan masing-masing (Cordet, 2025).

Namun, dalam implementasinya, Uni Eropa menemui beberapa tantangan. Misalnya, mengenai mekanisme partisipasi negara ketiga dalam proyek-proyek PESCO. Bagi beberapa negara anggota, diharapkan untuk membuka proyek-proyek tersebut bagi negara-negara seperti Norwegia atau Amerika Serikat, jika memiliki nilai tambah bagi mitra. Misalnya, dalam proyek Mobilitas Militer PESCO, partisipasi Amerika Serikat dapat memindahkan volume besar peralatan untuk pertahanan Eropa. Sedangkan untuk Norwegia sendiri merupakan kontributor utama dalam proyek-proyek EDA dan mitra dalam program pengadaan klaboratif Eropa. Tentunya, bagi sebagian negara lainnya tidak setuju karena PESCO dimaksudkan untuk negara-negara anggota Uni Eropa dan dikhawatirkan akan menimbulkan sensitivitas untuk negara-negara anggota lainnya (Zandee, 2018). Untuk mengatasi hambatan tersebut, Uni Eropa lalu mengeluarkan Keputusan Dewan (CFSP) 2020/1639 pada 5 November 2020, yang menetapkan kondisi umum di mana Negara-negara ketiga secara luar biasa dapat diundang untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek PESCO (Cozar-Murillo, 2022). Dalam (Eur-Lex, 2020) menyatakan bahwa keputusan ini mendefinisikan proses, persyaratan kelayakan, dan mekanisme pengawasan, memastikan bahwa negara ketiga yang ingin berpartisipasi harus memenuhi kriteria yang ketat dan mengikuti hukum yang ditetapkan di bawah kerangka kerja PESCO, khususnya Keputusan Dewan 2017/2315 dan 2018/909.

Aliansi dengan NATO juga menjadi sorotan dalam hal implementasi PESCO sebagai kerangka kerja sama pertahanan Uni Eropa. Tetapi terlihat bahwa aliansinya dengan NATO tetap baik dari segi politik, untuk menunjukkan bahwa organisasi dan mekanisme pertahanan ini tidak bersaing tetapi saling memperkuat,

maupun untuk memastikan pengembangan kemampuan yang konsisten. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, PESCO telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam mempromosikan otonomi strategis Eropa dan memperkuat industri pertahanan Eropa. Melalui kerja sama yang terstruktur, PESCO mempromosikan investasi bersama, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan kesiapan operasional di area-area kritis.

BAB III

ANCAMAN DAN KONFLIK TERHADAP UNI EROPA

Bab III akan menganalisis mengenai dinamika geopolitik di kawasan Uni Eropa pada periode 2009 – 2017 yang membentuk momentum politik untuk membentuk PESCO sebagai kerangka kerja sama pertahanan terintegrasi Uni Eropa. Dalam analisis ini, konsep “*political spillover*” dari neofungsionalisme digunakan sebagai kerangka acuan untuk memahami bagaimana perkembangan ini memicu integrasi yang lebih dalam di sektor pertahanan Uni Eropa.

A. Ancaman dan Kekhawatiran Yang Dihadapi Uni Eropa 2009 - 2017

1. Aneksasi Krimea oleh Rusia

Munculnya krisis keamanan di lingkungan Uni Eropa, terutama peristiwa diambilalihnya Krimea oleh Rusia telah menunjukkan bahwa sebagian besar negara anggota menunjukkan kelemahan yang mencolok dalam kemampuan dan kesiapan dalam hal pertahanan. Aneksasi Krimea telah disebut sebagai pelanggaran hukum internasional paling signifikan sejak berakhirnya Perang Dunia II yang menjadi elemen kunci dalam konfigurasi lingkungan keamanan Eropa.

Pada 23 Februari 2014, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengeluarkan instruksi kepada lembaga keamanan untuk memulai upaya merebut kembali Krimea. Seiring meningkatnya ketegangan di Simferopol, bentrokan meletus antara demonstran yang mendukung faksi pro-Rusia dan pro-Ukraina. Pada 26 Februari, Majelis Tatar Krimea, Qurultay, memutuskan untuk mengejar hak penentuan nasib sendiri dan memulihkan otonomi Tatar. Keesokan harinya, personel bersenjata tak dikenal, yang kemudian dikonfirmasi sebagai pasukan Rusia, mengambil alih lokasi-lokasi strategis di Krimea, termasuk parlemen regional dan gedung pemerintah, serta mengibarkan bendera Rusia. Pasukan pro-Rusia yang beroperasi dalam konteks lokal, dengan partisipasi unit Berkut dan sukarelawan, berhasil mengamankan pos-pos strategis. Pada 1 Maret, parlemen Rusia mengizinkan penggunaan kekuatan militer di Ukraina, sebagai respons terhadap permintaan resmi dari kepemimpinan pro-Rusia di Krimea. Meskipun ada kekhawatiran

komunitas internasional dan penolakan Ukraina yang diungkapkan di Dewan Keamanan PBB, pasukan militer Rusia telah mengelilingi instalasi militer Ukraina di Krimea (Jasutis, 2018).

Gambar III. 1

Peta Konflik Aneksasi Krimea oleh Rusia tahun 2014



Sumber: *What Russian annexation means for Ukraine's regions.*

<https://www.bbc.com/news/world-europe-63086767>. Diunduh pada 19 Juni 2025.

Berdasarkan gambar III. 1, keempat wilayah yang dianeksasi masih sebagian berada di bawah kendali Ukraina. Bersama-sama, Rusia membentuk 15% dari wilayah kedaulatan Ukraina. Dua wilayah di bagian Timur telah sebagian dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia sejak 2014. Akan tetapi, setelah tujuh bulan perang, Rusia hanya dapat mengklaim 60% dari Donetsk, dan Luhansk menjadi pusat serangan besar-besaran Ukraina. Pasukan Rusia mungkin hanya tinggal hitungan jam lagi untuk kehilangan kota strategis Lyman. Ibu kota regional Zaporizhzhia masih sepenuhnya dikendalikan oleh Ukraina, meskipun berada dalam jangkauan rudal Rusia, dan pasukan Ukraina hanya berjarak beberapa mil dari kota Kherson (Kirby, 2022).

Meskipun awalnya Rusia dengan tegas membantah keterlibatan langsung melalui militer dan pasukan khusus dalam peristiwa ini, Putin kemudian mengakui bahwa intervensi tersebut benar terjadi. Di mana referendum tentang status Krimea dilaksanakan di bawah pendudukan militer Rusia, dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sah dan mengikat. Namun, Rusia menggunakan referendum tersebut untuk melegitimasi aneksasi yang diselesaikan pada 18 Maret ketika Perjanjian Penggabungan Republik Krimea ke Rusia ditandatangani di Moskow oleh Aksyonov dan Putin (Kruk, 2019). Hingga akhir Maret, pasukan Rusia telah mencapai dominasi penuh atas aset militer Ukraina di wilayah tersebut. Namun, aneksasi ini dikecam secara luas oleh komunitas internasional sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina dan ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Budapest tahun 1994. Para ahli hukum dan badan internasional juga berpendapat bahwa proses tersebut kurang legitimasi, transparansi, dan dilaksanakan di bawah tekanan, menjadikannya tidak sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional (Zadorozhnii, 2016). Dalam menanggapi konflik ini, Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan bahwa untuk menghadapi kebangkitan Rusia di perbatasannya, Eropa harus “memperkuat kemampuan pertahanannya sendiri, secara mandiri dari Amerika Serikat, sebagai refleksi dari kedaulatan Eropa.” (The Local, 2018). Pernyataan ini bukan tanpa alasan karena Rusia tetap menjadi ancaman militer yang signifikan bagi komunitas keamanan Euro-Atlantik.

Di sisi lain, peristiwa aneksasi ini juga menimbulkan dampak yang signifikan di lingkungan keamanan Eropa Timur dan mempengaruhi arah integrasi pertahanan Eropa. Bagi sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur, terutama Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik, peristiwa ini memperkuat persepsi lama tentang Rusia sebagai kekuatan revisionis yang bersedia menggunakan kekuatan militer untuk menantang tatanan keamanan Eropa. Seperti yang dikemukakan (Maksymenko, 2015), aneksasi tersebut mengganggu tatanan perdamaian pasca-Perang Dingin yang stabil, sehingga mengungkap keterbatasan mekanisme internasional yang ada dalam mencegah agresi teritorial. Sebagai respons, negara-negara tersebut berusaha memperkuat kerja sama pertahanan regional, memperdalam hubungan dengan NATO, dan merevisi strategi keamanan nasional

mereka untuk mencerminkan realitas baru. Dalam lanskap geopolitik Eropa Timur, Polandia dan Rumania secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka dan meluncurkan inisiatif militer bilateral dan multilateral. Secara bersamaan, negara-negara seperti Lithuania telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, menandai pergeseran strategis dalam postur keamanan luar negeri mereka.

Sejak memulai reformasi militer komprehensif pada 2008, Rusia telah memodernisasi angkatan bersenjataanya dan semakin menggunakan kekuatan militer sebagai alat kebijakan luar negeri (Sokolsky, 2017). Pergeseran ini terlihat dalam proyeksi kekuatan militernya, dari tindakan agresif Rusia termasuk serangan siber terhadap Estonia dan AS, penempatan sistem rudal dan pertahanan udara di Kaliningrad (beberapa di antaranya memiliki kemampuan nuklir), serta ancaman penggunaan senjata nuklir terhadap negara-negara NATO yang memiliki sistem pertahanan rudal. Rusia juga sering mengirim pesawat militer ke wilayah udara NATO (Beraud-Sudreau & Giegerich, 2018), yang kemudian menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut bagi Eropa dan Amerika Serikat.

Uni Eropa memandang peristiwa aneksasi ini sebagai sebuah ancaman strategis bagi keamanan di wilayah Eropa. Pemimpin-pemimpin UE dengan segera mengecam aneksasi tersebut sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Ukraina, yang memunculkan serangkaian sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap Rusia. Menanggapi tindakan Rusia tersebut, Uni Eropa mengambil sikap yang lebih tegas dalam hal kerja sama pertahanan kolektif. Negara-negara anggota, terutama yang berada di Eropa Timur dan Baltik, mendesak pembentukan kerangka keamanan Eropa yang lebih kohesif dan otonom. Aneksasi tersebut memicu seruan untuk meningkatkan investasi dalam kemampuan pertahanan kolektif dan mengevaluasi kembali ketergantungan Eropa pada NATO dan Amerika Serikat sebagai aliansi keamanan (Maksymenko, 2015).

Dengan munculnya aneksasi Krimea, menunjukkan bahwa timbul kerentanan di kawasan perbatasan timur Eropa dan kebutuhan mendesak akan postur pertahanan yang kredibel. Reaksi yang ditunjukkan Uni Eropa, melalui sanksi, komunikasi strategis, dan inisiatif integrasi pertahanan, mencerminkan pergeseran

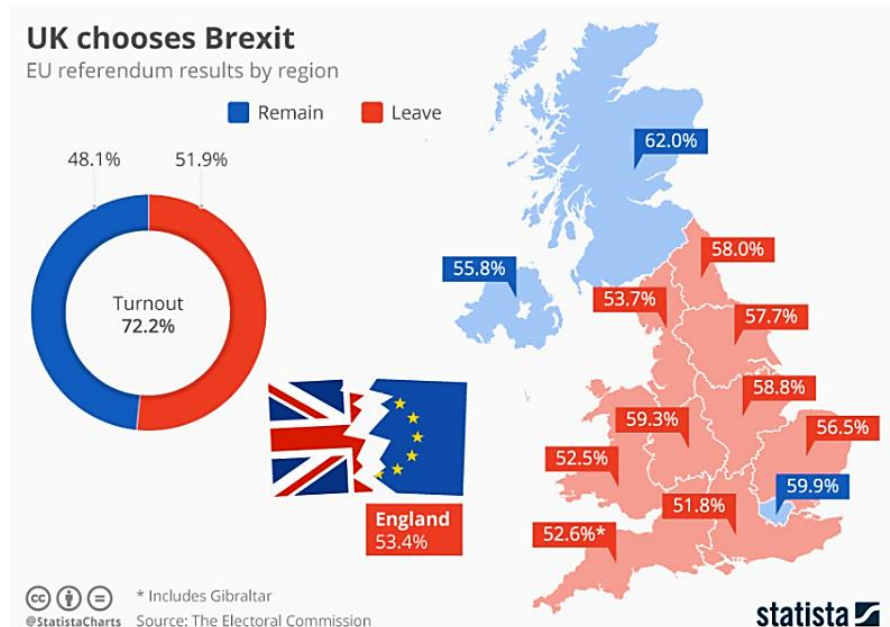
persepsi ancaman yang menempatkan pertahanan dari isu marjinal menjadi perhatian kebijakan utama. Melalui aneksasi ini, telah memicu kebangkitan minat di kalangan lembaga-lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk memperkuat kapasitas CSDP dengan mendorong negara-negara anggota menuju integrasi pertahanan yang lebih komprehensif melalui PESCO, yang menyoroti bahwa tanggapan nasional saja tidak lagi dianggap cukup untuk mencegah agresi eksternal.

2. Brexit dan Pergeseran Kepemimpinan Perancis-Jerman: Peluang Strategis untuk PESCO

Peristiwa keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa telah memicu kesadaran Uni Eropa terhadap inisiatifnya di sektor pertahanan dan keamanan. Sebelum resmi keluar dari keanggotaan, Inggris merupakan salah satu kontributor utama bagi anggaran Uni Eropa. Sebagai salah satu ekonomi terkuat di Uni Eropa, Inggris secara rutin memberikan kontribusi bruto yang signifikan setiap tahun ke Kerangka Keuangan Multitahun (*Multiannual Financial Framework* – MFF) Uni Eropa, yang mendanai berbagai kebijakan dan program, termasuk pertanian, kohesi, penelitian, dan tindakan luar negeri. Pada tahun 2015, total dana yang dikumpulkan mencapai 145 miliar Euro (Nurtyandini & Santoso, 2022). Status ini menempatkan Inggris tepat di belakang Jerman dan Prancis dalam hal kontribusi bruto, memperkuat perannya sebagai pilar keuangan utama Uni Eropa. Namun, setelah 47 tahun lamanya Inggris menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1973, akhirnya pada tanggal 23 Juni 2016, sekitar 52% pemilih yang berpartisipasi, memenangkan mayoritas suara untuk meninggalkan Uni Eropa.

Gambar III. 2

Peta Persebaran Negara Partisipasi Dalam Kampanye “*Leave EU*”



Sumber: *UK: A Divided Nation*. <https://www.statista.com/chart/5100/uk-chooses-brexit/>. Diunduh pada 19 Juni 2025.

Berdasarkan Gambar III. 2, Skotlandia memberikan suara hingga 62% untuk *Remain*, karena dikhawatirkan suara *leave* memicu warga Skotlandia setuju untuk meninggalkan Inggris; Irlandia Utara memberikan *remain* berbagi perbatasan yang dengan Irlandia, yang berada di Uni Eropa, khawatir menimbulkan isu-isu perdagangan yang dapat muncul di antara keduanya; kemudian, mayoritas warga Wales memilih untuk keluar, kecuali di kota terbesar, Cardiff, yang memilih untuk *remain* sebesar 60%; lalu, London, bersama dengan Skotlandia, memimpin pemungutan suara untuk tetap berada di Uni Eropa, meskipun sebagian kecil distrik memilih untuk keluar dengan *remain* sebanyak 59,9%. Hal ini membuka jalan bagi Inggris untuk menjadi negara pertama yang melakukannya.

Usulan awal mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa muncul pada tahun 2010, ketika Perdana Menteri David Cameron berjanji akan mengadakan referendum mengenai Perjanjian Lisbon. Keputusan ini dipengaruhi oleh kekhawatiran warga Inggris terkait dengan wewenang yang diperluas yang

diberikan kepada Uni Eropa oleh perjanjian tersebut (BBC, 2020). Kemudian, pada Pemilihan Umum 2015 menghasilkan mayoritas suara bagi Partai Konservatif, sehingga memudahkan negosiasi keanggotaan yang lancar. Setelah proses pemilihan yang panjang, Referendum Keanggotaan Uni Eropa dilaksanakan pada 23 Juni 2016 dan diumumkan pada 24 Juni dengan hasil referendum menyatakan kemenangan kampanye “*Leave EU*” dengan selisih tipis. Pengumuman ini dibuat setelah pemilihan kepemimpinan Partai Konservatif, dengan Theresa May terpilih sebagai Perdana Menteri selanjutnya dan ditugaskan untuk memimpin negosiasi penarikan diri Inggris dari Uni Eropa (Dunin-Wasowicz, 2017).

Keluarinya Inggris dari Uni Eropa awalnya dijadwalkan pada 30 Maret 2019. Namun, akibat penolakan berulang kali terhadap Perjanjian Penarikan yang diajukan oleh Perdana Menteri oleh *House of Commons* atau Dewan Perwakilan Rakyat dan penundaan Brexit yang berlanjut, Theresa May, Perdana Menteri Inggris saat itu, mengumumkan pengunduran dirinya, yang dijadwalkan akan berlaku pada 7 Juni 2019. Boris Johnson, tokoh kontroversial dalam Partai Konservatif, mantan Wali Kota London, dan salah satu pemimpin kampanye “*Leave EU*”, kemudian dinominasikan untuk menggantikan Theresa May pada 24 Juli 2019. Dalam pidato pelantikannya, Boris berupaya untuk menyelesaikan Brexit pada atau sebelum 31 Oktober 2019, sambil tetap terbuka terhadap kemungkinan Brexit, baik dengan atau tanpa perjanjian perdagangan. Setelah penangguhan Parlemen dan ketidakmampuan untuk mendapatkan persetujuan atas Perjanjian Penarikan atau Brexit tanpa kesepakatan, Johnson membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadwalkan pemilu umum pada 12 Desember 2019. Tujuan utama pemilu tersebut adalah untuk memberikan Partai Konservatif jumlah kursi yang cukup untuk meratifikasi Perjanjian Penarikan yang telah dinegosiasikan oleh Johnson. Hasil pemilu menunjukkan kemenangan besar bagi Partai Konservatif, yang memperoleh mayoritas parlemen terbesar sejak 1987 (Roberts, 2019). Inggris kemudian secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari 2020, dengan memastikan cukup anggota parlemen untuk meratifikasi Perjanjian Penarikan.

Sesuai dengan Pasal 50 (TEU), yang menetapkan prosedur bagi negara anggota untuk menarik diri dari uni eropa, jika negara anggota tersebut ingin melakukannya, maka Inggris secara resmi menarik diri dari Uni Eropa setelah menyatakan niatnya. Selanjutnya, penarikan diri ini akan berlaku efektif setelah perjanjian penarikan diri disetujui dan diratifikasi oleh Dewan Eropa (Wallenfeldt, 2025). Meskipun telah menarik diri, Inggris tetap menjadi terikat dengan Pasar Tunggal dan Uni Pabean Uni Eropa hingga akhir periode transisi 11 bulan yang dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2020. Periode yang panjang ini akan berakhir dengan keluarnya Inggris dari semua lembaga dan perjanjian yang terkait dengan Uni Eropa (CNBC Indonesia, 2020). Periode ini sangat penting, karena selama 11 bulan tersebut, Inggris dan Uni Eropa akan berusaha menegosiasikan Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement* – FTA) serta aspek-aspek penting lainnya dari hubungan bilateral di masa depan (Wright & Etherington, 2020). Hal ini mencakup semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari perjalanan dan ekonomi hingga urusan hukum dan pertahanan.

Brexit tidak hanya membentuk kembali lanskap politik Uni Eropa, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan di antara negara-negara anggotanya. Dengan keluarnya Inggris, dinamika yang telah berlangsung lama antara Inggris, Prancis, dan Jerman, yang merupakan tiga aktor paling berpengaruh di Eropa, memainkan peran sentral dalam menentukan kedalaman integrasi pertahanan Uni Eropa. Secara historis, hubungan antara Inggris, Prancis, dan Jerman di dalam Uni Eropa ditandai oleh kolaborasi dan perbedaan strategis, terutama terkait kebijakan pertahanan dan keamanan.

Prancis secara konsisten mengadvokasi gagasan otonomi strategis Eropa, yang menyerukan kapasitas pertahanan yang memungkinkan Eropa bertindak secara independen dari NATO jika diperlukan. Posisi ini menjadi lebih tegas setelah Perjanjian Lisbon tahun 2009, yang memperkenalkan ketentuan hukum seperti PESCO sebagai kerangka kerja potensial untuk kerjasama pertahanan yang lebih dalam (Howorth, 2014). Namun, implementasi praktis PESCO ditunda bertahun-tahun, sebagian besar karena perselisihan politik di antara negara anggota, terutama penolakan dari Inggris. Inggris, sebagai kekuatan militer utama di Eropa, secara

konsisten menentang aktivasi PESCO, khawatir hal itu akan menyebabkan duplikasi upaya NATO dan melemahkan ikatan keamanan trans-Atlantik. Posisi Atlantik yang tegas dari Inggris memprioritaskan NATO sebagai landasan pertahanan Eropa dan menolak inisiatif yang mungkin menciptakan struktur militer Uni Eropa yang otonom (Biscop, 2018). Sedangkan Jerman, meskipun secara historis berhati-hati dalam urusan militer karena warisan pasca Perang Dunia II, mulai mempertimbangkan kembali perannya dalam kebijakan keamanan pada masa ini. Aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014, eskalasi konflik di Timur Tengah, dan krisis migrasi yang terjadi di Eropa, berkontribusi pada kesadaran Jerman yang semakin meningkat akan kebutuhan akan kemampuan pertahanan Eropa yang lebih kuat (Pannier, 2021). Secara paralel, Prancis memperkuat seruan untuk integrasi pertahanan, terutama setelah serangan teroris di Paris pada 2015 dan operasi militernya di Afrika, yang mengungkap batas-batas kesiapan militer dan solidaritas Eropa (Fiott, 2018)

Di sisi lain, Brexit menimbulkan kekhawatiran terkait pendanaan pertahanan di dalam Uni Eropa. dikarenakan Inggris merupakan salah satu kontributor anggaran terbesar Uni Eropa, dan keluarnya negara tersebut secara tak terhindarkan menciptakan kekosongan keuangan. Meskipun pengeluaran pertahanan Inggris tidak secara langsung mendukung inisiatif militer Uni Eropa karena preferensinya terhadap struktur pertahanan antar pemerintah, kontribusi yang lebih luas terhadap anggaran Uni Eropa secara tidak langsung mendukung lembaga-lembaga yang terlibat dalam keamanan dan pertahanan, seperti EDA dan EEAS. Setelah Brexit, ada kekhawatiran bahwa inisiatif pertahanan di bawah kerangka Uni Eropa, terutama EDF mungkin akan mengalami kekurangan pendanaan. Namun, celah potensial ini segera diatasi oleh komitmen keuangan yang lebih kuat dari Prancis dan Jerman, dua ekonomi terbesar dan pengeluaran pertahanan terbesar di Uni Eropa. Kepemimpinan mereka memastikan bahwa pendanaan untuk inisiatif pertahanan strategis tetap aman meskipun Inggris keluar.

Sehingga dengan adanya Brexit mengakibatkan hilangnya hambatan utama bagi integrasi pertahanan Eropa. Kepergian Inggris menghilangkan veto de facto-nya atas inisiatif seperti PESCO, membebaskan Prancis dan Jerman untuk

memimpin dalam merumuskan ulang kebijakan pertahanan Uni Eropa (Schmidt, 2019). Menyadari jendela strategis ini, menyebabkan Prancis-Jerman mempercepat kerja sama mereka dan mendorong aktivasi formal PESCO pada akhir 2017 bersama negara-negara anggota lainnya. Inisiatif ini menandai titik balik dalam kerja sama pertahanan Eropa, memungkinkan negara anggota yang bersedia untuk berkolaborasi dalam pengembangan kemampuan, pengadaan bersama, dan proyek kesiapan militer.

Selain itu, pembentukan PESCO merupakan respons terhadap ancaman keamanan eksternal sekaligus hasil dari penyesuaian politik internal UE pasca-Brexit. Bagi Prancis dan Jerman, PESCO menyediakan mekanisme untuk menginstitutionalisasi visi mereka tentang otonomi strategis Eropa sambil memperkuat kepemimpinan mereka di Uni Eropa pasca-Brexit. Pada saat yang sama, PESCO menunjukkan tekad Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungannya pada penyedia keamanan eksternal dan untuk tampil sebagai aktor keamanan di kancah internasional. Meskipun Inggris tetap menjadi bagian penting dari keamanan Eropa melalui NATO dan perjanjian bilateral, keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara signifikan mengurangi pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan pertahanan Uni Eropa. Akibatnya, pembentukan PESCO melambangkan pergeseran strategis dalam tata kelola pertahanan Eropa, di mana kemitraan Prancis-Jerman, tanpa hambatan dari resistensi Inggris, dapat mendorong kerja sama pertahanan yang lebih dalam dalam kerangka Uni Eropa.

B. Konflik Yang Dihadapi Uni Eropa

1. Kritik Presiden Trump Terhadap Negara-negara NATO

Awal terjadinya konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa muncul pada tahun 2016, saat diselenggarakannya pemilihan umum presiden Amerika Serikat. Terkhusus, calon presiden Donald Trump, yang menyambut hasil referendum Brexit sebagai sebuah “kemenangan besar”, dan mengatakan kepada pemilih Inggris bahwa mereka telah menggunakan “hak suci”-nya untuk merebut kembali kemerdekaan dan mengembalikan kendali atas negara, perbatasan, dan perekonomian Inggris. Untuk memperkuat dukungan ini, Trump berjanji bahwa

Amerika Serikat akan menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan Inggris setelah negara tersebut resmi keluar dari Uni Eropa. Adanya Brexit ini menjadi pembuka jalan bagi terpilihnya Trump, karena hal itu memicu gelombang populis global. Interpretasi ini menyiratkan bahwa pemungutan suara Brexit melegitimasi seruan Trump untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan *“Make America Great Again.”* Fenomena ini juga mencerminkan sikap skeptis terhadap Uni Eropa dari pemerintahan saat ini, yang bertentangan dengan strategi kebijakan luar negeri AS yang dominan terhadap Eropa (Dimitrova A. , 2020). Masih dalam periode kampanye presiden, Trump berulang kali mempertanyakan tujuan NATO, memberikan pernyataan tajam dengan mengatakan bahwa NATO sebagai aliansi yang “usang”, karena tidak mampu menangani terorisme dengan baik dan bahwa anggota-anggota lain tidak membayar bagian mereka secara adil sehingga Amerika Serikat dibebani dengan pembayaran yang tidak adil sebagai anggota (Freisleben, 2017).

Pada 20 Januari 2017, Donald Trump resmi terpilih sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat periode 2017 – 2021. Hal ini menjadi momentum bagi Eropa, terutama aliansi Trans-Atlantik, untuk semakin meningkatkan upaya politik dalam memperkuat kerja sama di bidang pertahanan. Dikarenakan sulit untuk menghindari kesan bahwa pemerintahan Trump tidak dapat diprediksi dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai emosional dan tidak konsisten. Pada awal kepemimpinannya, Trump sudah menunjukkan ketidak-konsistennya. Hal ini terjadi saat menjamu Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, di Gedung Putih, “Saya (dahulu) mengatakan itu usang. Sekarang tidak lagi usang,” tutur Trump. Ia malah menyebut bahwa NATO sebagai benteng perdamaian dan keamanan internasional, dan berusaha untuk mengambil kredit atas upaya NATO dalam memerangi terorisme dan meningkatkan pengeluaran pertahanan (Ackerman, 2017).

Pada pertemuan KTT NATO di Brussels pada 25 Mei 2017. Trump tidak secara eksplisit mendukung klausul bantuan timbal balik atau Pasal 5 dalam Perjanjian NATO. Memang, Trump memuji respons NATO terhadap serangan 9/11 dan berbicara tentang “komitmen yang mengikat kita sebagai satu kesatuan.”

Namun, ia tidak secara khusus berkomitmen untuk menghormati Pasal 5, yang mengatur bahwa sekutu NATO lainnya harus memberikan bantuan kepada sekutu yang diserang jika pasal tersebut diaktifkan. Selain itu, Trump tidak segan untuk menegur secara langsung negara-negara anggota NATO yang tidak memenuhi komitmen keuangan mereka kepada aliansi tersebut. “Dua puluh tiga dari 28 negara anggota masih belum membayar apa yang seharusnya mereka bayarkan dan apa yang seharusnya mereka bayarkan untuk pertahanan mereka. Ini tidak adil bagi rakyat dan pembayar pajak Amerika Serikat.” Kata Trump. “Kita harus menyadari bahwa dengan pembayaran yang terus menerus kurang dan ancaman yang semakin besar, bahkan dua persen dari PDB tidak cukup untuk menutup celah dalam modernisasi, kesiapan, dan ukuran pasukan,” tambahnya (Gray, 2017).

Trump kemudian ikut bergabung dalam KTT G7 di Taormina, Italia, pada 26 – 27 Mei 2017, Trump secara resmi menyatakan penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris mengenai pencegahan perubahan iklim, yang beranggotakan 195 negara. Dilansir dari (The White House, 2017), Trump mengutarakan kekhawatirannya bahwa perjanjian tersebut akan melemahkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan kedaulatan nasional, sehingga menempatkan negara tersebut pada posisi yang kurang menguntungkan secara kompetitif. Selain itu, Trump juga mengutarakan keraguan terkait kebijakan iklim yang tercantum dalam Perjanjian Paris. Pernyataan Trump menyebabkan pemimpin-pemimpin Eropa mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan yang sama besarnya, karena fakta bahwa Amerika Serikat sendiri merupakan negara penghasil polusi terbesar kedua di dunia. Dengan kejadian ini, hanya akan mengganggu aliansi kritis dengan negara-negara lain yang berkomitmen pada target iklim ambisius yang menyebabkan beberapa negara mempertanyakan keandalan Amerika Serikat sebagai mitra dalam menangani krisis iklim.

Dilansir dari (VOA, 2017), Komisaris Perubahan Iklim Uni Eropa, Miguel Arias Cañete, berpendapat bahwa “pengumuman Trump tersebut telah menguatkan kita, alih-alih melemahkan kita, dan kekosongan ini akan diisi oleh kepemimpinan baru yang luas dan berkomitmen. Eropa bersama dengan mitra-mitranya yang kuat di seluruh dunia siap untuk memimpin.” Hasilnya, negara-negara seperti China,

India, dan anggota Uni Eropa lainnya mulai lebih tegas dalam memperjuangkan isu-isu terkait iklim. China, khususnya, memanfaatkan kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat, menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam transisi energi hijau global. Meskipun Cina masih menjadi sumber utama polusi karbon yang mendorong kenaikan suhu global, negara tersebut mencapai target energi terbarukan pada tahun 2024, enam tahun lebih awal, dan telah memasang lebih banyak tenaga surya dan angin daripada negara lain mana pun (Popli, 2025).

Setelah kedua pertemuan tersebut, akhirnya hubungan antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat kembali memanas karena Trump terus mengkritik sekutu Eropa, terkhusus Jerman, dengan berbagai alasan. Diantaranya adalah kontribusi Jerman yang dianggap tidak memadai terhadap NATO dan terjadi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Jerman (Kanat, 2018). Dalam unggahannya di media sosial, Trump menyatakan bahwa "Kami (Amerika Serikat) memiliki defisit perdagangan yang besar dengan Jerman, plus mereka membayar kurang dari yang seharusnya untuk NATO dan militer. Sangat buruk bagi AS. Ini akan berubah." Beberapa bulan kemudian, Merkel lalu memberikan komentar dengan menegaskan bahwa ini merupakan era baru dalam hubungan transatlantik. Ia menegaskan bahwa "Kita orang Eropa harus benar-benar mengambil takdir kita sendiri." (Schoen, 2017).

2. Ancaman Penarikan Pasukan Militer Amerika Serikat di Eropa

Penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Eropa, terutama dari Jerman, yang direncanakan selama era Donald Trump menjabat, menimbulkan dampak strategis yang signifikan bagi Uni Eropa terutama di bidang pertahanan. Meskipun perintah penarikan pasukan ini secara resmi dikeluarkan baru pada tahun 2020, namun, sentimen yang mendominasi dan tekanan politik yang semakin meningkat untuk mengurangi komitmen militer Amerika Serikat di Eropa telah muncul sejak awal masa kepresidenan Trump. Ia kerap kali mempertanyakan nilai NATO, berkali-kali mengkritik sekutu Eropa karena tidak memenuhi kewajiban pengeluaran pertahanan mereka, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat

menanggung beban yang tidak adil dari aliansi tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pemimpin Uni Eropa.

Jamie Shea, mantan Wakil Sekretaris Jenderal bidang tantangan keamanan baru di NATO mengatakan bahwa, pada Juli 2020 militer Amerika Serikat mengumumkan rencananya untuk menarik sekitar 12.000 tentara dari Jerman. Keputusan ini mengikuti perselisihan berkepanjangan antara Presiden Trump dan Berlin, dan merupakan bagian dari pergeseran strategis yang lebih luas dalam kehadiran militer di Eropa. Namun, Amerika Serikat akan tetap mempertahankan kehadiran yang signifikan di wilayah tersebut, dengan hampir setengah dari tentara yang ditarik, untuk menangani potensi ketegangan dengan Rusia. Dalam pengumuman terbaru, Trump juga mengindikasikan niatnya untuk mengurangi ukuran kehadiran militer Amerika Serikat di Jerman sekitar sepertiga (Friends of Europe, 2020). Keputusan ini mengikuti kritik Trump terhadap Jerman, sekutu dekat Amerika Serikat, atas kegagalan negara tersebut memenuhi target pengeluaran pertahanan NATO dan dugaan eksploitasi Amerika Serikat melalui perjanjian perdagangan.

Dalam pernyataan yang kemungkinan besar akan menimbulkan kekhawatiran di Moskow, Menteri Pertahanan Mark Esper, mengindikasikan bahwa sebagian pasukan AS akan dipindahkan ke wilayah Laut Hitam, dengan sebagian lainnya berpotensi ditempatkan secara sementara dalam gelombang ke wilayah Baltik. Selain itu, markas militer Eropa yang saat ini berlokasi di Stuttgart, Jerman, akan dipindahkan ke Belgia. Diperkirakan sekitar 6.000 dari 12.000 pasukan yang meninggalkan Jerman akan tetap berada di Eropa (Ali & Stewart, 2020). Kebijakan Trump ini tampaknya merupakan bagian dari agenda “*America First*” yang tujuannya menjadi peringatan bagi Uni Eropa, terlepas dari apakah rencana tersebut dilaksanakan atau tidak. Rencana tersebut mengungkap retakan dalam solidaritas NATO tetapi juga mempercepat upaya UE untuk mengejar kerja sama pertahanan yang terinstitusionalisasi melalui PESCO.

C. PESCO sebagai Hasil Institusional dari Tekanan Geopolitik

Sikap konfrontatif yang ditunjukkan oleh Trump terhadap aliansi NATO maupun keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, menjadi faktor tekanan eksternal yang signifikan yang mengubah diskursus keamanan dan pertahanan di Eropa. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti keterbatasan dari mekanisme atau kebijakan pertahanan yang ada dan mengungkap adanya kerenggangan hubungan Trans-Atlantik. Pemimpin Eropa dihadapkan pada lingkungan global yang semakin tidak stabil, akibatnya, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tekad politik untuk mendirikan mekanisme pertahanan Uni Eropa yang kredibel dan otonom. PESCO dibentuk bukan sebagai inisiatif saja, melainkan sebagai respons langsung terhadap ancaman yang bertumpuk dan ketidakpastian strategis. Dalam hal ini, PESCO bukan hanya hasil dari perkembangan hukum dan institusional, tetapi juga dari kebutuhan geopolitik dan dampak politik yang dipicu oleh guncangan eksternal dan penyesuaian internal.

Oleh karena itu, Pada tanggal 22 – 23 Juni 2017, Dewan Eropa mengadakan pertemuan bersama negara-negara anggota. Pernyataan yang dirilis dalam (European Council, 2017), Presiden Dewan Eropa, Donald F. Tusk, menyatakan bahwa Dewan Eropa telah menghasilkan tiga keputusan penting, yakni pertama, Dewan Eropa sepakat untuk memperpanjang sanksi terhadap Rusia selama enam bulan; Kedua, Eropa akan terus bekerja untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, bekerja sama dengan mitra internasional Uni Eropa; dan ketiga, para pemimpin EU-27 menyetujui prosedur pemindahan dua badan Uni Eropa yang berbasis di Inggris. Keputusan ini merupakan upaya Uni Eropa untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh Brexit. Selain itu, Perdana Menteri Theresa May juga menginformasikan bahwa pada 26 Juni akan mengajukan proposal tentang hak-hak warga negara Uni Eropa di Inggris. Hak-hak warga negara adalah prioritas nomor satu untuk EU27, dan kami telah membuat posisi kami jelas. Kami ingin memastikan hak-hak penuh bagi warga negara Uni Eropa dan Inggris setelah Brexit.

Hasil dari pertemuan tersebut dinyatakan dalam Kesimpulan Pertemuan Dewan Eropa yang dirilis oleh (European Council, 2017). Dalam *report* tersebut,

Dewan Eropa menyepakati pentingnya peluncuran PESCO yang ambisius dan inklusif. Kerangka kerja sama akan diimplementasikan sejalan dengan Pasal 42(6) dan 46 TEU serta Protokol 10, dengan maksud untuk memperkuat keamanan dan pertahanan Eropa dalam lingkungan geopolitik yang meningkat dan untuk membantu mencapai tingkat ambisi Uni Eropa yang dinyatakan dalam EUGS 2016. Kerangka kerja sama juga disetujui untuk dibuat oleh negara-negara anggota dalam waktu tiga bulan ke depan, memungkinkan negara-negara anggota berada dalam posisi untuk melakukannya untuk memberitahukan niat mereka untuk berpartisipasi tanpa penundaan. Proyek yang dilakukan ini harus konsisten dengan perencanaan pertahanan nasional negara-negara anggota dan Proyek-proyek dan inisiatif kolaboratif yang konkret juga harus diidentifikasi untuk mendukung tujuan, komitmen, dan kriteria umum PESCO.

Pada tanggal 21 Juli 2017, Prancis dan Jerman, yang kini bergabung dengan Italia dan Spanyol secara resmi menginformasikan kepada para Menteri Pertahanan Eropa dan Perwakilan Tinggi, Federica Mogherini, tentang proposal mereka. Isi proposal tersebut memperjelas bahwa “peningkatan kemampuan pertahanan negara-negara anggota Uni Eropa juga akan menguntungkan NATO dan memperkuat pilar Eropa di dalam Aliansi serta menanggapi tuntutan berulang kali untuk pembagian beban trans-Atlantik yang lebih kuat”. Lebih jauh lagi, proposal tersebut menekankan bahwa PESCO harus saling melengkapi dengan NATO, yang akan terus menjadi landasan pertahanan kolektif bagi para anggotanya. Sementara itu, proposal tersebut juga mendapat dukungan dari Belgia, Republik Ceko, Finlandia, dan Belanda (EUROMIL, n.d.)

Dalam mendukung peluncuran kerangka kerja sama pertahanan ini, pada pernyataan yang dikeluarkan oleh (Council of the EU, 2017) pada tanggal 13 November 2017, para menteri dari 23 negara anggota menandatangani notifikasi bersama tentang PESCO dan menyerahkannya kepada Perwakilan Tinggi dan Dewan. Kerangka kerja permanen untuk kerja sama pertahanan ini akan memungkinkan negara-negara anggota yang bersedia dan mampu untuk bersama-sama mengembangkan kemampuan pertahanan, berinvestasi dalam proyek-proyek bersama, atau meningkatkan kesiapan operasional dan kontribusi angkatan

bersenjata mereka. Negara-negara anggota yang menandatangani notifikasi bersama adalah: Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Kroasia, Siprus, Estonia, Finlandia, Spanyol, dan Swedia. Ada kemungkinan bagi negara-negara anggota lainnya untuk bergabung pada tahap selanjutnya. Pemberitahuan bersama ini merupakan langkah formal pertama untuk mendirikan PESCO. Notifikasi ini mengadopsi keputusan tentang PESCO berisi tiga lampiran; yakni Prinsip-prinsip PESCO; Komitmen yang ditetapkan dalam Pasal 2 Protokol 10 tentang PESCO; serta proposal mengenai tata kelola PESCO.

Dewan Menteri Luar Negeri kemudian mengadopsi Keputusan Dewan (CFSP) 2017/2315, PESCO secara resmi diluncurkan oleh Dewan pada tanggal 11 Desember dengan 25 negara Uni Eropa yang mengambil bagian di dalamnya. Setelah diaktifkan, PESCO menjadi jawaban terhadap urgensi dalam menghadapi ketidakpastian, dan peluang untuk mendefinisikan kembali Uni Eropa tidak hanya sebagai aktor ekonomi tetapi juga aktor keamanan yang kredibel di panggung global. Serta dapat menjadi elemen penting dalam pengembangan pertahanan bersama Eropa dan akan memperkuat pilar Eropa di dalam aliansi NATO.

BAB IV

KESIMPULAN

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dari temuan penelitian yang berjudul “Latar Belakang Pembentukan *Permanent Structured Cooperation* (PESCO) Sebagai Strategi Pertahanan Uni Eropa”. Pembentukan PESCO pada tahun 2017 merupakan momen transformatif dalam proses integrasi Uni Eropa, yang memperluas kewenangan fungsional Uni Eropa ke dalam ranah politik tingkat tinggi dan pertahanan kolektif. Perkembangan ini bukan hanya tonggak sejarah institusional, tetapi juga merupakan respons strategis terhadap tantangan keamanan eksternal yang terus-menerus dan dinamika internal yang terus berkembang di dalam Uni Eropa. Pembentukan PESCO menunjukkan bahwa lintasan integrasi Eropa, yang awalnya berakar pada saling ketergantungan ekonomi, telah berevolusi ke arah sektor yang lebih strategis, terutama setelah meningkatnya ancaman keamanan dan pergeseran tatanan global.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PESCO muncul sebagai konsekuensi dan alat kerja sama politik yang lebih dalam di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Struktur hukum di bawah Perjanjian Lisbon, terutama Pasal 42(6) dan 46 TEU, memungkinkan negara-negara yang bersedia dan mampu untuk bekerja sama lebih erat dalam bidang pertahanan. Perkembangan geopolitik antara tahun 2009 dan 2017, seperti aneksasi Rusia atas Krimea, meningkatnya ketidakpastian tentang komitmen Amerika Serikat di bawah Presiden Trump, dan implikasi institusional Brexit - memperkuat kesadaran Uni Eropa akan kerentanan dan ketergantungannya pada aktor-aktor keamanan eksternal. Perkembangan ini menciptakan rasa urgensi baru di dalam Uni Eropa untuk memperkuat kapasitas pertahanannya sendiri, dan PESCO dibentuk sebagai respons terstruktur terhadap ancaman yang dirasakan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi dan ketahanan strategis.

Konsep *political spillover* atau limpahan politik dari teori neofungsionalisme memberikan konsep dasar yang berguna untuk memahami pembentukan PESCO. Ketika integrasi dalam satu sektor, seperti ekonomi dan politik meningkat, maka

dorongan dan insentif untuk kerja sama di sektor-sektor yang berdekatan, seperti pertahanan, menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Dalam hal ini, evolusi kelembagaan Uni Eropa, khususnya melalui CSDP, menjadi dasar bagi kolaborasi pertahanan yang lebih dalam. Akan tetapi, hanya ketika ancaman eksternal dan kepemimpinan internal, terutama dari Perancis dan Jerman, bertemu dengan kesiapan institusional, limpahan politik menjadi cukup kuat untuk mengubah tujuan abstrak otonomi strategis menjadi mekanisme yang konkrit dan mengikat. Selain itu, dinamika politik internal di antara negara-negara anggota juga memainkan peran penting dalam membentuk sifat dan ambisi PESCO.

Pada saat yang sama, dinamika internal di dalam Uni Eropa secara signifikan mempengaruhi struktur dan ambisi PESCO. Perbedaan budaya strategis, kemampuan militer yang tidak setara, dan tingkat kemauan politik yang berbeda di antara negara-negara anggota menjadi tantangan bagi kesatuan pertahanan Uni Eropa. Namun demikian, desain PESCO yang fleksibel - yang memungkinkan partisipasi sukarela dan berbagai tingkat komitmen - telah memungkinkan inklusi yang lebih luas tanpa mengorbankan tujuan strategis intinya. Perancis dan Jerman berperan penting dalam membentuk inisiatif ini, menggunakan kekuatan politik mereka untuk mengumpulkan konsensus dan mempromosikan visi pertahanan bersama di dalam Uni Eropa.

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana PESCO beroperasi tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai bagian dari ekosistem pertahanan Uni Eropa yang lebih luas. Ini bekerja bersama-sama dengan inisiatif seperti EDF, CARD, dan EDA. Bersama-sama, kerangka kerja ini mencerminkan ambisi Uni Eropa yang lebih luas untuk mengembangkan pendekatan yang lebih koheren dan terintegrasi untuk pertahanan. Gelombang pertama proyek PESCO, termasuk mobilitas militer dan pertahanan siber, menunjukkan upaya Uni Eropa untuk memperkuat kemampuan strategis, meningkatkan interoperabilitas, dan mendukung pengembangan industri pertahanan Eropa yang kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, S. (2017). 'No longer obsolete': Trump backtracks on Nato with Russia tensions rising. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/12/trump-nato-meeting-russia-syria-missile-attack>
- Ali, I., & Stewart, P. (2020). U.S. to withdraw about 12,000 troops from Germany but nearly half to stay in Europe. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/world/us-to-withdraw-about-12000-troops-from-germany-but-nearly-half-to-stay-in-eur-idUSKCN24U20A/>
- Anghel, S. E., & Bacian, I. C. (2016). Implementation of the Lisbon Treaty provisions on the Common Security and Defence Policy (CSDP). Diakses dari [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2016\)573285](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2016)573285)
- Arteaga, F. (2018). PeSCo: THE SPANISH PERSPECTIVE. Paris: Armament Industry European Research Group.
- Aydin-Duzgit, S., & Marrone, A. (2018). PESCO and Security Cooperation Between the EU and Turkey. Turkey: Instituto Affari Internazionali.
- BBC. (2020). Brexit: A brief history of Britain and the EU. Diakses dari <https://www.bbc.co.uk/newsround/50166269>
- Beraud-Sudreau, L., & Giegerich, B. (2018). Diakses dari <https://www.iiss.org/publications/survival/2018/survival-global-politics-and-strategy-augustseptember-2018/604-08-sudreau-and-giegerich>
- Bergmann, J. (2019). Neofunctionalism and EU external policy integration: the case of capacity building in support of security and development (CBSD)". *Journal of European Public Policy*. Hal. 1257.
- Berridge, G. R., & James, A. (2003). A Dictionary of Diplomacy. New York: Palgrave Macmillan.
- Billion-Galand, A. & Quencez, M. (2017). Can France and Germany PESCO Work as a Process Toward EU Defense?. *The German Marshall Fund of the United States*, No. 033. Hal. 1 – 8.
- Bindi, F. (2018). Why Trump and Brexit Will Lead to a Stronger EU Security. Diakses dari <https://carnegieendowment.org/2018/11/26/why-trump-and-brexit-will-lead-to-stronger-eu-security-pub-77775>

- Biscop, S. (2018). European Defence: Give PESCO a Chance. *Survival*, Hal. 161 - 180.
- Blockmans, S., & Crosson, D. M. (2019). *Differentiated Intgeration Within PESCO - Clusters and Convergence in EU Defense* . Brussels: Centre for European Policy Studies.
- Blockmans, S., & Crosson, D. M. (2021). PESCO: A FORCE FOR POSITIVE INTEGRATION IN EU DEFENCE. *European Foreign Affairs Review*, Hal. 89.
- Brattberg, E., & Valasek, T. (2019). EU Defense Cooperation: Progress Amid Transatlantic Concerns. Washington D.C.
- Caranta, R. (2023). The EU's Role in Ammunition Procurement. *European Papers*, Hal. 1048 - 1049.
- CNBC Indonesia. (2020). Sayonara Inggris! Resmi, Tak Lagi jadi Anggota Uni Eropa. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200201065110-17-134419/sayonara-inggris-resmi-tak-lagi-jadi-anggota-uni-eropa#top>
- Collignon, S. (2012). Europe's Debt Crisis, Coordination Failure, and International Effects. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Consilium Europa. (2002). *CONV 461/02 WG VIII 22 Final Report of Working Group VIII*. Chairman of Working Group VIII - Defence. Diakses dari <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CV-461-2002-INIT/en/pdf>
- Cordet, M. (2025). EU Defence Series: PESCO Must Step Up. Diakses dari <https://icds.ee/en/eu-defence-series-pesco-must-step-up/>
- Council of the EU. (2017). *Defence cooperation: 23 member states sign joint notification on the Permanent Structured Cooperation (PESCO)*. Brussels: Council of the EU.
- Cozar-Murillo, B. (2022). PESCO As A Game-Changer For Differentiated Integration In CSDP After Brexit. *European Papers*, Hal. 1303 - 1324 .
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: SAGE Publication Inc.
- CVCE. (2015). Franco–British St. Malo Declaration (4 December 1998). Diakses dari https://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f/publishable_en.pdf
- Daehnhardt, P. (2018). European Defence and German Defence Cooperation. *Nação e Defesa*, Hal. 94 - 114.

- Defence Ministries of France, G. S. (2017). Diakses dari <https://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2017/08/principescommuns-pesco-propfrallespita@ue170721.pdf>
- Diamond, J. (2018). Trump sides with Putin over US intelligence. Diakses dari <https://edition.cnn.com/2018/07/16/politics/donald-trump-putin-helsinki-summit>
- Dimitrova, A. (2020). The State of the Transatlantic. *Fondation Robert Schuman*, Hal. 1 - 6.
- Dr. J. R. Raco, M. M. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Dunin-Wasowicz, R. (2017). The referendums of 1975 and 2016 illustrate the continuity and change in British Euroscepticism. Diakses dari <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/07/31/the-referendums-of-1975-and-2016-illustrate-the-continuity-and-change-in-british-euroscepticism/>
- EEAS. (2021). The Common Security and Defence Policy. Diakses dari https://www.eeas.europa.eu/eeas/common-security-and-defence-policy_en
- EUR-Lex. (2017). Council Decision (CFSP) 2017/2315 of 11 December 2017 establishing permanent structured cooperation (PESCO) and determining the list of participating Member States. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315>
- EUR-Lex. (2018). Council Decision (CFSP) 2018/909 of 25 June 2018 establishing a common set of governance rules for PESCO projects. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/909/oj/eng>
- Eur-Lex. (2020). Council Decision (CFSP) 2020/1639 of 5 November 2020 establishing the general conditions under which third States could exceptionally be invited to participate in individual PESCO projects. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/1639/oj/eng>
- EUROMIL. (t.thn.). PESCO? Soon a Reality?. Diakses dari <https://euromil.org/pesco-soon-a-reality/>
- European Council. (2017). *European Council meeting (22 and 23 June 2017)*. Brussels: European Council.
- European Council. (2017). *Remarks by President Donald Tusk after the European Council meetings on 22 and 23 June 2017*. Brussels: European Council.

- Eurlex. (2017). Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/treaty-establishing-the-european-coal-and-steel-community-ecsc-treaty.html>
- European Council. (2018). Defence cooperation: Council adopts an implementation roadmap for the Permanent Structured Cooperation (PESCO). Diakses dari <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/06/defence-cooperation-council-adopts-an-implementation-roadmap-for-the-permanent-structured-cooperation-pesco/>
- European Council. (2021). Treaty of Rome - reading references. Diakses dari <https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/library/library-blog/posts/treaty-of-rome-reading-references/>
- FINABEL. (2018). Behind PESCO: The Past and Future. *European Army Interoperability Center*, Hal. 5 - 6.
- Fiott, D. (2017). European Defence, 60 Years After the Treaty of Rome. Diakses dari <https://eda.europa.eu/webzine/issue13/opinion/european-defence>
- Fiott, D. (2018). Strategic autonomy: towards 'European sovereignty' in defence? *European Union Institute for Security Studies (EUISS)*, Hal. 1 - 8.
- Fiott, D., Missiroli, A., & Tardy, T. (2017). Permanent Structured Cooperation: What's In A Name? *European Union Institute For Security Studies*, Hal 1 - 16.
- France, O. D. (2019). PeSCo: THE FRENCH PERSPECTIVE. *French Institute for International and Strategic Affairs*, Hal. 1-16.
- Freisleben, S. (2017). A guide to Trump's past comments about NATO. Diakses dari <https://www.cbsnews.com/news/trump-nato-past-comments/>
- Friends of Europe. (2020). *Pulling US forces from Europe: show me the sense please*. Brussels: European Union.
- Gawron-Tabor, K., & Willa, R. (2023). Involvement Of Eu Member States In Pesco Projects: A Comparative Analysis. *Athenaum: Polish Political Science Studies* , Hal. 21 - 46.
- Gordon, P. H. (2020). Trump's Sudden and Dangerous Troop Withdrawal From Germany. Diakses dari <https://www.cfr.org/in-brief/trumps-sudden-and-dangerous-troop-withdrawal-germany>
- Gotkowska, J. (2017). Berlin and PESCO: German priorities in developing military cooperation within the EU. Diakses dari

<https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2017-10-25/berlin-and-pesco-german-priorities-developing-military-cooperation>

- Gotkowska, J. (2018). *The trouble with PESCO, The mirages of European defence*. Poland: Ośrodek Studiów Wschodnich
- Gray, R. (2017). Trump Declines to Affirm NATO's Article 5. Diakses dari <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/05/trump-declines-to-affirm-natos-article-5/528129/>
- Haas, E. B. (1958). *The Uniting of Europe*. Notre Dame: University of Notre.
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian; Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2019). Grand theories of European integration in the twenty-first century. *Journal of European Public Policy*, Hal. 1114 – 1115.
- Hooper, K. (2016). European Project Dealt a Blow with Brexit Vote and Challenges to Migration Management. Diakses dari <https://www.migrationpolicy.org/article/european-project-dealt-blow-brexit-vote-and-challenges-migration-management>
- Hooper, K. (2022). Romney: 10 years later, Russia remains 'geopolitical foe'. Diakses dari <https://www.politico.com/news/2022/02/27/mitt-romney-russia-remains-geopolitical-foe-00012124>
- Howorth, J. (2014). *Security and Defence Policy in the European Union*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Jasutis, G. (2018). Crimea: Between Annexation and Reunification. *War Report 2018*, Hal. 1 - 7.
- Jopp, M., & Schubert, J. (2019). PESCO and New Methods of Intergovernmental Integration. *L'Europe en formation*, Hal. 126.
- Kakissis, J. (2012). George Papandreou: Greece Had To Make Changes. Diakses dari <https://www.npr.org/2012/05/01/150804420/george-papandreou-greece-had-to-make-changes>
- Kanat, K. B. (2018). Transatlantic Relations in the Age of Donald Trump. *Insight Turkey*, Hal. 77 - 88.
- Khaghani, B. (2015). North Atlantic Treaty Organization (NATO): Yesterday Objectives, Today Strategies. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, Hal. 1307 - 1308.

- Kielmansegg, S. G. (2019). The Historical Development of EU Defence Policy: Lessons for the Future?. Diakses dari <https://verfassungsblog.de/historical-development-lessons-for-the-future>
- Kirby, P. (2022). What Russian annexation means for Ukraine's regions. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-63086767>
- Koenig, N., & Walter-Franke, M. (2017). France and Germany: Spearheading A European Security and Defence Union?. *Institut Jacques Delors*. Hal. 1 – 18.
- Kruk, K. (2019). The Crimean Factor: How the European Union Reacted to Russia's Annexation of Crimea. Diakses dari <https://warsawinstitute.org/crimean-factor-european-union-reacted-russias-annexation-crimea/>
- Maksymenko, I. (2015). Eastern European Regional Cooperation After Crimea: The Art Of The Possible. *UA:Ukraine Analytica*, Hal. 1 - 63.
- Marrone, A. (2018). *PeSCo: THE ITALIAN PERSPECTIVE*. Paris: Armament Industry European Research Group.
- Matlary, J. H. (2018). *Britain*. Dalam *Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mehta, A. (2018). US warns against 'protectionism' with new EU defense agreement. Diakses dari <https://www.defensenews.com/smr/munich-security-forum/2018/02/14/us-warns-against-protectionism-with-new-eu-defense-agreement/>
- Niemann, A. (2016). *Theorizing Internal Security Cooperation in the European Union*. Oxford: Oxford University Press.
- Nurtyandini, R. T., & Santoso, M. P. (2022). The Impact of The Brexit Referendum on European Union Immigration Policy In The Uk. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, Hal. 44 - 53.
- Palmeri, T., & Herszenhorn, D. (2017). Leaders issue G7 declaration with U.S. a holdout on climate change. Diakses dari <https://www.politico.com/story/2017/05/27/trump-paris-climate-deal-238883>
- Pannier, A. (2021). Complementarity or competition? Franco-British Cooperation and the European Horizon of French Defense Policy. *Focus stratégique*, Hal. 11.
- Peruzzi, L. (2019). The EU approves the third round of PESCO projects, now focusing on their implementation. Diakses dari

<https://www.edrmagazine.eu/the-eu-approves-the-third-round-of-pesco-projects-now-focusing-on-their-implementation>

- Popli, N. (2025). What Happened the Last Time Trump Withdrew From the Paris Agreement. Diakses dari <https://time.com/7208955/trump-paris-climate-agreement-withdraw-impact/>
- Riley, A., & Ghilles, F. (2016). BREXIT: Causes and Consequences. *notes internacionales CIDOB*, Hal. 1 - 4.
- Roberts, J. M. (2019). The domestic fallout from the UK general election. Diakses dari Atlantic Council: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-domestic-fallout-from-the-uk-general-election/>
- Rutigliano, S. (2023). Ukraine Conflict's Impact on European Defence and Permanent Structured Cooperation (PESCO). *European Papers*, Hal. 769.
- Santopinto, F. (2018). PeSCo: THE BELGIAN PERSPECTIVE. *Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP)*, Hal. 1-10.
- Schild, J., & Krotz, U. (2018). Back to the future? Franco-German bilateralism in Europe's post-Brexit union. *Journal of European Public Policy*, Hal. 1174 - 1193.
- Schmidt, H. (2019). The Emergence of a European Defence: Between Deepening Integration and Transatlantic Alliance. *Global Affairs*, Hal. 405-418.
- Schoen, J. W. (2017). Trump's tweet tirade against Germany could backfire on US. Diakses dari <https://www.cnbc.com/2017/05/30/trumps-tweet-tirade-against-germany-could-backfire-on-us.html>
- Sloan, S. R. (2017). Don't Count on Germany to Save the West. Diakses dari <https://warontherocks.com/2017/06/dont-count-on-germany-to-save-the-west/>
- Sokolsky, R. (2017). The New NATO-Russia Military Balance: Implications for European Security. Diakses dari <https://carnegieendowment.org/2017/03/13/new-nato-russia-military-balance-implications-for-european-security-pub-68222>
- Stokes, B. (2017). NATO's Image Improves on Both Sides of Atlantic. Diakses dari <https://www.pewglobal.org/2017/05/23/natos-image-improves-on-both-sides-of-atlantic/>
- The Local. (2018). Macron calls for 'real European army' to defend against Russia and US. Diakses dari <https://www.thelocal.fr/20181106/macron-calls-for-real-european-army-to-defend-against-russia-and-us>

- The Washington Post. (2011). The Security and Defense Agenda (As delivered by Secretary of Defense Robert Gates, Brussels, Belgium, June 10, 2011). Diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/the-security-and-defense-agenda-as-delivered-by-secretary-of-defense-robert-gates-brussels-belgium-june-10-2011/2011/06/10/AGqlZhOH_story.html?utm_term=.1d8d2821c229
- The White House. (2017). Statement by President Trump on the Paris Climate Accord. Diakses dari https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/?utm_source=link&utm_medium=header
- Thomas, L., & Hephher, T. (2017). France and Germany to develop new European fighter jet. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-france-germany-defence/france-and-germany-to-develop-new-european-fighter-jet-idUSKBN19Y1FJ>
- Tranholm-Mikkelsen, J. (1991). Neo-functionalism: Obstinate or Obsolete? A Reappraisal in the Light of the New Dynamism of the EC. *Millenium – Journal of International Studies*, Hal. 5.
- Varga, G. (2017). *Towards European Strategic Autonomy? Evaluating the New CSDP Initiatives*. Budapest: Institute for Foreign Affairs and Trade
- VOA. (2017). Europe Leaders React Angrily to Trump Climate Pact Decision. Diakses dari <https://www.voanews.com/a/europe-leaders-react-angrily-trump-climate-pact-decision/3883296.html>
- Wallenfeldt, J. (2025). Brexit: Meaning, Referendum, Date, & Consequences. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/Brexit>
- Weiss, T., Fernandes, S., & Pisklova, M. (2024). Institutional Inertia and Change: Explaining the Czech and Portuguese Engagement in European Defence Market Integration. *Journal of Common Market Studies*, Hal. 784 - 800 .
- Wright, G., & Etherington, H. (2020). Brexit transition period. Diakses dari <https://www.instituteforgovernment.org.uk/article/explainer/brexit-transition-period>
- Zadorozhnii, O. (2016). To Justify Against All Odds: The Annexation of Crimea in 2014 and the Russian Legal Scholarship. *Polish Yearbook of International Law*, Hal. 139–169.
- Zandee, D. (2018). *PESCO implementation: the next Challenge*. Clingendael: Netherlands Institute of International Relations.